



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
SAMARINDA

TAHUN **2022**
Laporan
KINERJA

Instansi Pemerintah

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
SAMARINDA

☎ 0542-262062

✉ informasi@ptun-samarinda.go.id

🌐 www.ptun-samarinda.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunianya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2022 telah selesai disusun. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi dan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas. Selain itu penyusunan LKJIP Tahun 2021 adalah untuk memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2877/SEK/OT.01.1/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda terus berupaya melakukan peningkatan kinerja dan layanan peradilan agar target-target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2022 dapat tercapai atau bahkan melampaui. Pemenuhan sarana dan prasarana Pengadilan serta layanan disabilitas juga terus ditingkatkan. Termasuk juga layanan bagi masyarakat tidak mampu melalui keberadaan Layanan Pos Bantuan Hukum dan Layanan Pembebasan biaya perkara.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini merupakan hasil realisasi dan capaian kinerja atas pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan. Diharapkan laporan ini dapat menyajikan dan memberikan gambaran kualitas kinerja Pengadilan terhadap tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Laporan ini diharapkan juga dapat menjadi pendorong dalam upaya peningkatan kinerja layanan, peningkatan kepuasan masyarakat dan para pencari keadilan, peningkatan pemberian akses kepada golongan tidak mampu, dan peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dapat menjadi Pengadilan Modern yang selalu memberikan pelayanan yang prima, bebas dari korupsi, bersih dan melayani berbasis teknologi informasi.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini masih terdapat kekurangan dalam penyusunannya, untuk itu kami mengharapkan evaluasi, saran dan kritikan yang membangun sehingga penyusunan laporan ini menjadi lebih baik dan akuntabel.

Samarinda, 27 Februari 2023
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
KETUA,



ELIZABETH E.H.L. TOBING, S.H., M.Hum.
NIP. 19760705 200003 2 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2022, merupakan perwujudan dana transparansi akuntabilitas Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggarannya. Selain itu, Laporan Kinerja ini merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi, sebagaimana penjabaran dalam tujuan/sasaran strategis, sebagaimana Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda 2020-2025, Rencana Kerja Tahun 2022, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Dalam rangka menghadapi perubahan yang cepat dan dinamis, dalam rangka melaksanakan Peradilan yang Cepat, Sederhana dan Berbiaya Ringan, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda memiliki visi “Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Agung dan Modern”. Dalam mencapai visi tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mempunyai tugas menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda selalu berusaha melaksanakannya dengan penuh integritas, transparan, dan akuntabel, dengan mengedepankan asas profesionalitas, proporsionalitas, dan keterbukaan.

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda memiliki sasaran strategis yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. IKU tersebut dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Sasaran strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2022 yaitu Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel, Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan, Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan, dan Meningkatnya Transparansi Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Pada Tahun 2022, Persentase Rata-Rata Realisasi Kinerja Tahun 2022 yaitu 65,92% lebih tinggi dari Rata-Rata Target Kinerja yaitu 64,67%, dengan Capaian Kinerja Tahun 2022 adalah 185,12%. Rata-rata realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 65,92% lebih rendah dari rata-rata target kinerja jangka menengah sebesar 69,67%, sehingga rata-rata capaian kinerja tahun 2022 terhadap target kinerja jangka menengah hanya sebesar 94,62%.

Dalam melaksanakan Realisasi Kinerja agar dapat mencapai Target Kinerja, tersedia dukungan anggaran baik DIPA 01 maupun DIPA 05. Pagu Anggaran DIPA 01 BUA Tahun 2022 setelah revisi adalah Rp.6.200.893.000,- (*Enam Miliar Dua Ratus Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah*) dan realisasi anggaran tahun 2022 Rp.6.026.784.429,- (*Enam Miliar Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*) atau sebesar 97,19%.

Sementara Pagu Anggaran DIPA 05 Ditjen Badilmiltun Tahun 2022 adalah Rp.36.500.000,- (*Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*) dan realisasi anggaran Tahun 2022 adalah Rp.32.159.000,- (*Tiga Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) dengan persentase realisasi sebesar 88,1%.

DAFTAR ISI

	hal.
Kata Pengantar	I
Ikhtisar Eksekutif	
Daftar Isi	Iii
I. PENDAHULUAN	1
II. PERENCANAAN KINERJA	10
III. AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Kinerja Organisasi	18
1. Keadaan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2022	
2. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	20
3. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	59
4. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	67
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	71
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	73
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun gagal pencapaian kinerja pernyataan kinerja	76
B. Realisasi Anggaran	83
IV. PENUTUP	91
Lampiran	
1. Struktur Organisasi	
2. Indikator Kinerja Utama	
3. Perjanjian Kinerja	
4. Rencana Kinerja	
5. SK Tim Penyusunan LkjIP	

DAFTAR TABEL

	hal.
Tabel 2.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	13
Tabel 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2022	14
Tabel 2.3. Rencana Kinerja Tahun 2023	15
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	16
Tabel 2.5. Pagu DIPA TA 2021 PTUN Samarinda (sebelum revisi)	16
Tabel 2.6. Pagu DIPA (Revisi) TA 2021 PTUN Samarinda	17
Tabel 3.1. Matrik Keadaan Perkara PTUN Samarinda Tahun 2022	18
Tabel 3.2. Matrik Keadaan Perkara PTUN Samarinda Tahun 2021	19
Tabel 3.3. Capaian Kinerja Tahun 2022	23
Tabel 3.4. Sisa Perkara Yang Diselesaikan	23
Tabel 3.5. Pengukuran Kinerja pada IKU Sisa Perkara Yang Diselesaikan	24
Tabel 3.6. Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	26
Tabel 3.7. Pengukuran Kinerja pada IKU Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	27
Tabel 3.8. Perbandingan Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	28
Tabel 3.9. Pengukuran Kinerja pada IKU Tahun 2021 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	28
Tabel 3.10. Perbandingan Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kassai dan Jumlah Perkara Yang Telah Diputus di Tingkat Banding	30
Tabel 3.11. Pengukuran Kinerja pada IKU Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	31
Tabel 3.12. Perbandingan Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK dan Jumlah Perkara Yang Telah Diputus di Tingkat Kasasi	32
Tabel 3.13. Pengukuran Kinerja pada IKU Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK	33
Tabel 3.14. Mutu Pelayanan	35
Tabel 3.15. Tingkat Kepuasan	36
Tabel 3.16. Tingkat Kepuasan Masyarakat Tiap Responden	37
Tabel 3.17. Pengukuran Kinerja pada IKU Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	38
Tabel 3.18. Perbandingan Jumlah Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu dan Jumlah Putusan Tingkat Pertama Tahun 2022	39
Tabel 3.19. Pengukuran Kinerja pada IKU Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	40

Tabel 3.20. Data Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi, PK Yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	41
Tabel 3.21. Pengukuran Kinerja pada IKU Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	42
Tabel 3.22. Perbandingan Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 (satu) hari setelah putus dan Jumlah Perkara Yang Menarik Perhatian	44
Tabel 3.23. Pengukuran Kinerja pada IKU Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 (satu) hari setelah putus	44
Tabel 3.24. Perbandingan Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan dan Jumlah Perkara Prodeo	46
Tabel 3.25. Pengukuran Kinerja pada IKU Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	46
Tabel 3.26. Perbandingan Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dan Jumlah pencari keadilan golongan tertentu	48
Tabel 3.27. Pengukuran Kinerja pada IKU Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan posbakum	49
Tabel 3.28. Perbandingan Jumlah putusan perkara TUN yang telah ditindaklanjuti dengan dengan Jumlah Putusan perkara yang BHT	50
Tabel 3.29. Pengukuran Kinerja pada IKU Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti	51
Tabel 3.30. Perbandingan Jumlah putusan perkara TUN yang dimohonkan eksekusi dengan dengan Jumlah Putusan perkara yang BHT	52
Tabel 3.31. Pengukuran Kinerja pada IKU Persentase Putusan Perkara TUN yang dimohonkan eksekusi	53
Tabel 3.32. Perbandingan Target (Pagu Anggaran DIPA 01) dan Realisasi (Realisasi Anggaran DIPA 01)	54
Tabel 3.33. Pengukuran Kinerja pada IKU Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Pegawai, Operasional, Pemeliharaan dan Belanja Modal	55
Tabel 3.34. Perbandingan Target (Pagu Anggaran DIPA 05) dan Realisasi (Realisasi Anggaran DIPA 05)	56
Tabel 3.35. Pengukuran Kinerja pada IKU Persentase Penyerapan Anggaran Manajemen Peradilan Militer dan TUN	57
Tabel 3.36. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Tahun 2021 dengan Tahun 2022	60
Tabel 3.37. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022 serta Perkembangannya	63
Tabel 3.38. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022 serta Perkembangannya	65
Tabel 3.39. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah Renstra 2020-2024	68
Tabel 3.40. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	74
Tabel 3.41. Pagu DIPA 01 BUA Mahkamah Agung Tahun 2022	82
Tabel 3.42. Rincian Belanja DIPA 05 559858	83
Tabel 3.43. Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2022	84
Tabel 3.44. Perbandingan Pelaksanaan Anggaran DIPA 01 Tahun 2021 dengan Tahun 2022	84
Tabel 3.45. Realisasi Anggaran DIPA 05 Badilmiltun Tahun 202	85
Tabel 3.46. Perbandingan Pelaksanaan Anggaran DIPA 05 Tahun 2021 dengan Tahun	86

2022

Tabel 3.47. PNBP 01 BUA Tahun 2022

87

Tabel 3.48. Perbandingan Realisasi PNBP 01 BUA Tahun 2021 dan Tahun 2022

88

Tabel 3.49. PNBP 05 Badilmiltun Tahun 2020

89

Tabel 3.50. Perbandingan Realisasi PNBP 05 Badilmiltun Tahun 2021 dan Tahun 2022

89

DAFTAR GRAFIK

	hal.
Grafik 3.1. Perbandingan Statistik Keadaan Perkara Tahun 2022 dan Tahun 2021	19
Grafik 3.2. Statistik Rasio Perbandingan Penanganan Perkara	20
Grafik 3.3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja	22
Grafik 3.4. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan	24
Grafik 3.5. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu	27
Grafik 3.6. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	29
Grafik 3.7. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	31
Grafik 3.8. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK	33
Grafik 3.9. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	38
Grafik 3.10. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Persentase Salinan Putusan Yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu	40
Grafik 3.11. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	43
Grafik 3.12. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dan Tepat Waktu	45
Grafik 3.13. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	47
Grafik 3.13. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	49
Grafik 3.15. Perbandingan Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti	51
Grafik 3.16. Perbandingan Persentase Putusan Perkara TUN yang Dimohonkan Eksekusi	53
Grafik 3.17. Perbandingan Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Pegawai, Operasional dan Pemeliharaan, dan Belanja Modal	55
Grafik 3.18. Perbandingan Persentase Penyerapan Anggaran Manajemen Peradilan Militer dan TUN	58
Grafik 3.19. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2022	61
Grafik 3.20. Perbandingan Rata -Rata Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2022	62
Grafik 3.21. Perbandingan Pelaksanaan Anggaran DIPA 01 Tahun 2021 dan Tahun 2022	85
Grafik 3.22. Perbandingan Pelaksanaan Anggaran DIPA 05 Tahun 2021 dan Tahun 2022	86
Grafik 3.23. Perbandingan Perbandingan PNBP 01 BUA Tahun 2021 dan Tahun 2022	88
Grafik 3.24. Perbandingan Realisasi PNBP 05 Ditjenmiltun Tahun 2021 dan Tahun 2022	90

DAFTAR GAMBAR

	hal.
Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda	6
Gambar 1.2. Sistematika Penyajian Laporan	9

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk Tahun 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini.

Samarinda, 27 Februari 2023
Pereviu LKjIP



Epi Randabunga Runggu, S.E.
NIP.19790204 200502 2 001

BAB I – PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi dilakukan guna mewujudkan negara dan pemerintahan yang memenuhi karakteristik good governance. Salah satu azas penyelenggaraan good governance menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yaitu bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk akuntabilitas tersebut berupa Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2022 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2023 dan perjalanan Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2020-2024 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Pengadilan Tata Usaha Negara. Laporan Kinerja ini juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja seluruh unit organisasi dan untuk mendapatkan masukan dari stakeholders untuk perbaikan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dibentuk sebagai tidak lanjut upaya mewujudkan pemerataan untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum serta tercapainya penyelesaian perkara secara sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1994 Tentang Pengadilan Bandar Lampung, Samarinda, dan Denpasar menjadi landasan legal dalam pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda diresmikan pada tanggal 10 Juni 1995 oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Bapak Oetoyo Oesman, S.H.

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda memiliki tanggung jawab menjalankan tugas dan fungsinya untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana tujuan dibentuknya peradilan tata usaha negara yang mampu menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, dan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 351/KMA/SK/XII/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Sebelumnya Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang terdiri dari :

- Provinsi Kalimantan Timur, antara lain :
 1. Kota Samarinda
 2. Kota Balikpapan
 3. Kota Bontang
 4. Kabupaten Kutai Kartanegara
 5. Kabupaten Paser
 6. Kabupaten Berau
 7. Kabupaten Penajam Paser Utara
 8. Kabupaten Kutai Barat
 9. Kabupaten Kutai Timur
 10. Kabupaten Mahakam Ulu

- Provinsi Kalimantan Utara, antara lain :
 1. Kota Tarakan
 2. Kabupaten Nunukan
 3. Kabupaten Malinau
 4. Kabupaten Bulungan
 5. Kabupaten Tana Tidung

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dituntut wajib mempertanggung jawabkan segala pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda merupakan pengadilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara di bawah naungan Mahkamah Agung RI. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mengacu pada peraturan-peraturan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Keusaan Kehakiman;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Tugas dari Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

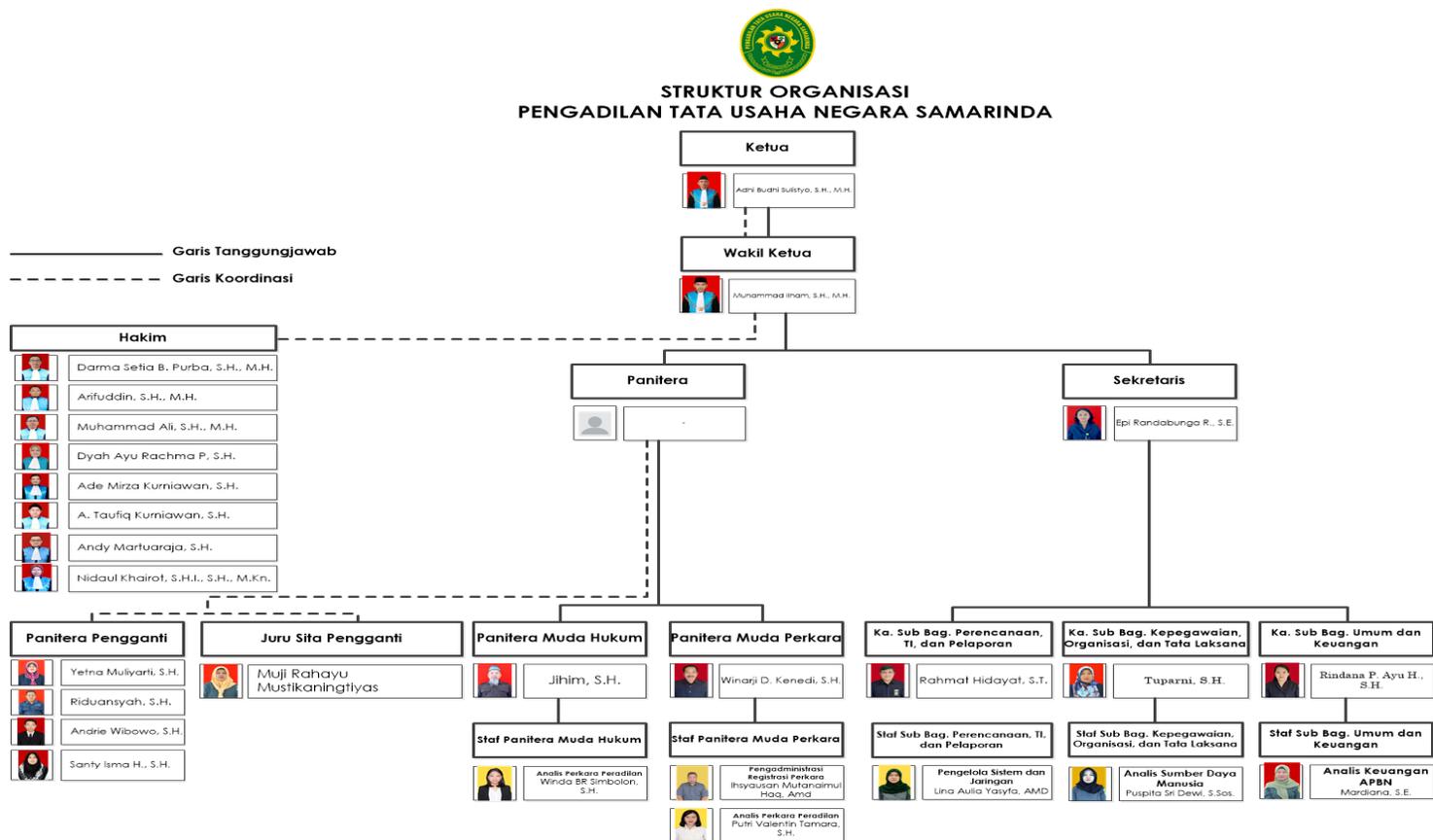
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda memiliki fungsi antara lain :

1. Fungsi sebagai lembaga pengawas (*judicial control*) terhadap tindakan pejabat administrasi supaya tetap berada dalam rel hukum dan sebagai wadah melindungi hak individu dan warga masyarakat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat administrasi.
2. Fungsi administratif, yaitu menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta yang lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
3. Fungsi pengelolaan keuangan dan penggunaan barang milik negara (bmn) yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Fungsi pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada seluruh aparatur pengadilan, baik mengenai teknis yudisial, administrasi peradilan dan administrasi umum.
5. Fungsi pengawasan internal, yaitu sebagai kontrol terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi oleh aparatur pengadilan.
6. Fungsi pelaporan, yaitu sebagai lembaga peradilan tingkat pertama yang memiliki kewajiban melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Pengadilan Tingkat Banding maupun kepada Mahkamah Agung RI.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Berikut ini adalah Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA TAHUN 2022



*Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda merupakan pendekatan pemecahan tantangan dan peluang dalam penyelenggaraan peradilan. Hal ini untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional, yaitu Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.

1. ARAH KEBIJAKAN

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, yang selaras dengan kebijakan Mahkamah Agung RI dengan mempertimbangkan tantangan dan potensi yang ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dalam upaya mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Sasaran Strategis yang ingin dicapai oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yaitu :

- a. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
- b. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
- c. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
- d. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;
- e. Meningkatnya Transparansi Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Dalam mencapai Sasaran Strategis tersebut Tantangan Utama (*Strategic Issue*) dan Potensi yang ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yaitu :

a. Tantangan Utama (*Strategic Issue*)

Tantangan-tantangan yang ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dapat dilihat dalam beberapa aspek, yaitu :

- 1) Aspek Peraturan / Perundang-undangan
 - Peraturan – peraturan sebagai petunjuk teknis pelaksanaan yang berbenturan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi/tafsiran.
- 2) Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)
 - SDM Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda masih terbatas.
 - Kemampuan SDM yang berbeda-beda.
 - Beban Kerja SDM yang belum proporsional.
 - Belum ada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang sesuai dengan bidang keilmuan dan keahlian, sementara Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) terbatas pada 3 (tiga) bidang yaitu pramubakti, supir dan satpam.

- 3) Aspek Organisasi dan Tata Laksana
 - Koordinasi organisasi yang belum optimal.
- 4) Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Pembinaan dan Pengawasan yang belum optimal.
- 5) Aspek Sarana dan Prasarana
 - Sarana dan prasarana yang masih terbatas karena keterbatasan anggaran.
- 6) Aspek Teknologi Informasi
 - Pengembangan dan Pembaruan Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - Keterbatasan perangkat teknologi informasi dan komunikasi.
- 7) Aspek anggaran
 - Keterbatasan anggaran belanja modal dalam mendukung peningkatan dan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran.
- 8) Aspek lainnya
 - Pandemi Covid-19
 - Perilaku dan Kebiasaan pada Masyarakat.

b. Potensi

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda memiliki potensi yang beragam, baik potensi yang telah diatur dan tercakup dalam peraturan/perundang-undangan maupun potensi yang baru dan berkembang. Potensi-potensi tersebut antara lain :

- 1) Peraturan / perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sebagai pengadilan di tingkat pertama.
- 2) Kemampuan Sumber Daya Manusia yang ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.
- 3) Sarana dan Prasarana yang terus diupayakan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi Hakim, Aparatur Pengadilan dan Masyarakat Pencari Keadilan.
- 4) Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi yang ada dalam menyokong era digital menuju Peradilan yang modern.
- 5) Anggaran, untuk mendukung pelaksanaan operasional Pengadilan baik belanja pegawai, operasional perkantoran, sarana dan prasarana perkantoran, serta dukungan penyelenggaraan teknis, seperti pelaksanaan prodeo dan posbakum.

2. STRATEGI

Untuk mencapai Sasaran Strategis yang telah ditetapkan tersebut, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menyusun dan mereviu Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolak ukur capaian kinerja, mereviu Rencana Strategis 2020-2024, menyusun Target Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kinerja Tahunan 2022-2023, dan menyusun Rencana Aksi Kinerja sebagai panduan untuk mencapai target kinerja tersebut.

E. SISTEMATIKA PELAPORAN

Penyajian Laporan Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2022 berpedoman pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, sebagai berikut :



Gambar 1.2. Sistematika Penyajian Laporan

BAB II – PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda 2020-2024 adalah gambaran kinerja dan rencana kinerja dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yang merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda 2020-2024 memuat visi dan misi yang merupakan pancuan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan Misi tersebut kemudian dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

1. Visi dan Misi

Tahun 2022 merupakan tahun ke-3 (ketiga) dari 5 (lima tahun) pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda 2020-2024. Rencana Program dan Kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mengacu pada rencana, program, visi dan misi yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI.

Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yaitu :

“Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Yang Agung dan Modern”.

Visi tersebut memiliki makna untuk menjalankan kekuasaan kehakiman yang meTujurdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan yang merdeka dan peradilan yang jujur dan adil.

Dalam rangka mencapai visi tersebut, dirumuskan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah :

1. Menjaga kemandirian dan integritas badan peradilan
2. Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Biaya Ringan, Transparan dan Modern

3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka Peningkatan Pelayanan bagi pencari keadilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan
5. Mewujudkan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif dan Efisien

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis.

Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sebagaimana Tujuan Mahkamah Agung RI pada tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan;
2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung.

Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada Tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;
5. Meningkatnya Transparansi Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020 – 2024, dan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2020 – 2024, serta dalam mewujudkan visi ”Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menetapkan Rencana strategis 2020-2024 sebagai berikut :

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda selalu direviu setiap tahun. Reviu Indikator Kinerja Utama (Reviu IKU) Pengadilan Tata Usaha Samarinda telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan surat keputusan Nomor : W2-TUN.5/190A/OT.01.3/II/2022 Tanggal 7 Februari 2022 Tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara TUN yang diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	Panitera / Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
9.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
10.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
11.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
12.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
13.		Persentase Putusan Perkara TUN yang Dimohonkan Eksekusi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
14.	Meningkatnya transparansi pengelolaan keuangan dan aset	Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Pegawai, Operasional dan Pemeliharaan, dan Belanja Modal	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
15.		Persentase Penyerapan Anggaran Manajemen Peradilan Militer dan TUN	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2022-2023

Rencana Kinerja Tahun 2022-2023 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda merupakan rancangan atas sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2022 s.d Tahun 2023 dengan mempertimbangkan Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Hasil Capaian Kinerja Tahun 2021, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Rencana Kinerja Tahun 2022-2023 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Rencana Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	75 %
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	40 %
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	25 %
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK	60 %
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80 %
	Persentase salinan putusan perkara TUN yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100 %
	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	90 %
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu Satu Hari Setelah Putus	5 %
	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti	5 %
Meningkatnya transparansi pengelolaan keuangan dan aset	Persentase Putusan Perkara TUN yang Dimohonkan Eksekusi	20 %
	Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Pegawai, Operasional dan Pemeliharaan, dan Belanja Modal	95 %
	Persentase Penyerapan Anggaran Manajemen Peradilan Militer dan TUN	75 %

Rencana Kinerja Tahun 2023 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3. Rencana Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	40 %
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	25 %
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK	60 %
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80 %
	Persentase salinan putusan yang telah di minutasikan/dikirimkan ke pengadilan pengaju tepat waktu	90 %
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase salinan putusan perkara yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100 %
	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	20 %

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	75%
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	40%
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	25%
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	60%
	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara TUN yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	90%
	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu satu hari setelah putus	5%
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
	Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti	5%
	Persentase Putusan Perkara TUN yang Dimohonkan Eksekusi	20%
Meningkatnya transparansi pengelolaan keuangan dan aset	Persentase penyerapan anggaran belanja pegawai, operasional dan pemeliharaan, dan belanja modal	95%
	Persentase penyerapan anggaran manajemen Peradilan Militer dan TUN	75%

Untuk melaksanakan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp.5.705.981.000,- (*Lima Miliar Tujuh Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.5. Pagu DIPA TA 2022 PTUN Samarinda (sebelum revisi)

Program	Anggaran (Rp)
Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah agung	5.609.481.000
Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	60.000.000
Program peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	36.500.000
Jumlah	5.705.981.000

Pagu Anggaran Tahun 2021 tersebut direvisi menjadi sebesar Rp.6.140.893.000,- (*Enam Miliar Seratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.6. Pagu DIPA (Revisi) TA 2021 PTUN Samarinda

Program	Anggaran (Rp)
Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung	6.140.893.000
Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	60.000.000
Program peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN	36.500.000
Jumlah	6.237.393.000

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Setiap akhir periode instansi pemerintah melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Data – data yang diperlukan dalam pengukuran kinerja adalah dokumen penetapan kinerja, realisasi capaian output/outcome, pagu anggaran dan realisasi anggaran.

1. Keadaan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2022

Penanganan perkara pada satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah mengalami peningkatan sejak pelaksanaan persidangan e-Litigasi. Persentase rasio penanganan perkara pada Tahun 2022 sebesar 76,56% (tujuh puluh enam koma lima enam persen), meningkat sebesar 4,68% (empat koma enam delapan persen) dari persentase rasio penanganan perkara Tahun 2021 yang sebesar 71,88% (tujuh puluh satu koma delapan delapan persen).

Keadaan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Matrik Keadaan Perkara PTUN Samarinda Tahun 2022

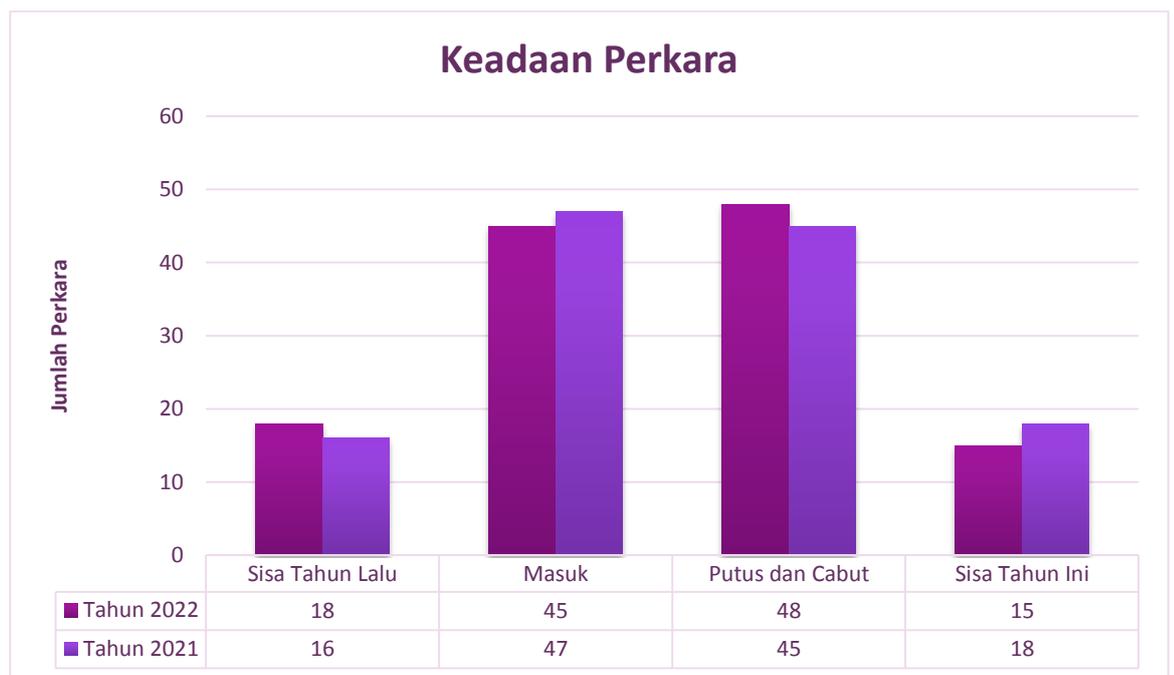
No	Perkara	Sisa Tahun lalu	Masuk	Putus dan Cabut	Sisa Tahun ini	Rasio Penanganan Perkara	Bandung	Kasasi	PK	Pengawasan Eksekusi
1	Gugatan	18	45	48	15	76,19%	20	15	7	4
2	Permohonan UU AP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Gugatan Keberatan (KIP)	-	1	1	-	100%	-	-	-	-
Total		18	46	49	15	76,56%	20	15	7	4

Keadaan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2. Matrik Keadaan Perkara PTUN Samarinda Tahun 2021

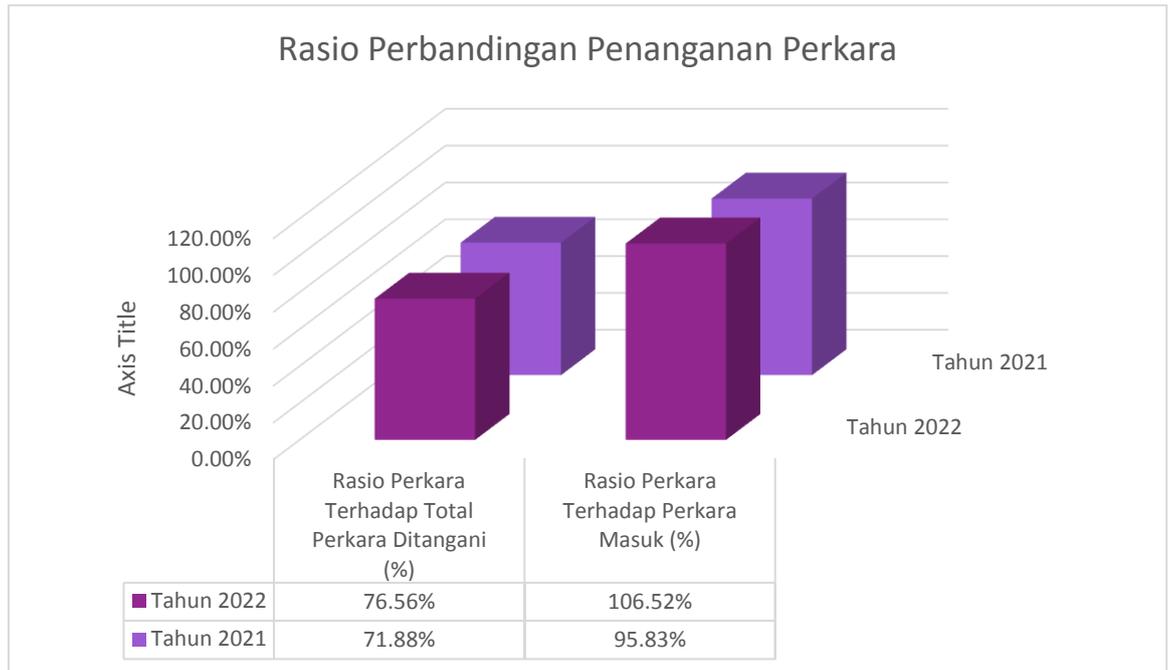
No	Perkara	Sisa Tahun lalu	Masuk	Putus dan Cabut	Sisa Tahun ini	Rasio Penanganan Perkara	Banding	Kasasi	PK	Pengawasan Eksekusi
1	Gugatan	16	47	45	18	71,42%	30	22	4	-
2	Permohonan UU AP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Gugatan Keberatan (KIP)	-	1	1	-	100%	-	-	-	-
Total		16	48	46	18	71,88%	30	22	4	-

Untuk melihat grafik perbandingan Penangan Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2022 dan Tahun 2021, dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Grafik 3.1. Perbandingan Statistik Keadaan Perkara Tahun 2022 dan Tahun 2021

Untuk melihat Grafik Statistik Rasio Perbandingan Penanganan Perkara Tahun 2022 dengan Penanganan Perkara Tahun 2021 (dalam persentase).



Grafik 3.2. Statistik Rasio Perbandingan Penanganan Perkara

2. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pengukuran Kinerja dilakukan untuk dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian kinerja yaitu :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

Pengukuran Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi masing- masing indikator kinerja sasaran. Hasil Capaian Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3. Capaian Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100,00%	100,00%
	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	75%	80,43%	107,24%
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : Banding	40%	76,92%	192,31%
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : Kasasi	25%	42,86%	171,43%
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : PK	60%	88,89%	148,15%
	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	100,00%	125,00%
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara TUN yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	70%	100,00%	142,86%
	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	90%	94,64%	105,16%
	Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu Satu Hari Setelah Putus	5%	25,00%	500,00%
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	0,00%	0,00%
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100,00%	100,00%
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	5%	0,00%	0,00%
	Persentase Putusan Perkara TUN yang Dimohonkan Eksekusi	20%	2,00%	10,00%
Meningkatnya transparansi pengelolaan keuangan dan aset	Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Pegawai, Operasional dan Pemeliharaan, dan Belanja Modal	95%	98,05%	103,21%
	Persentase Penyerapan Anggaran Manajemen Peradilan Militer dan TUN	75%	82,95%	110,60%

Untuk Membandingkan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja dapat dilihat pada gambar grafik berikut ini :



Grafik 3.3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan – kegiatan yang telah ditetapkan.

Analisis terhadap capaian kinerja dari masing-masing Sasaran dan Indikator Kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) **Sasaran Kinerja : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**
 - a) **Prosentase sisa perkara yang diselesaikan**

Sisa perkara yaitu tunggakan penyelesaian perkara TUN pada tahun sebelumnya diselesaikan pada Tahun ini. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan.

Pada tahun 2022 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda memiliki sisa perkara tahun 2021 sebanyak 18 (delapan belas) perkara. Jumlah sisa perkara Tahun 2021 tersebut menjadi target sisa perkara yang diselesaikan pada Tahun 2022.

Target sisa perkara yang diselesaikan adalah 18 (delapan belas) perkara. Realisasi sisa perkara yang diselesaikan 18 (delapan belas) perkara. Dengan demikian Realisasi Kinerja Sisa Perkara Yang Diselesaikan pada Tahun 2022 adalah 100% (seratus persen).

Tabel 3.4. Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Sisa Perkara Tahun 2021	Target Jumlah Sisa Perkara Yang Harus Diselesaikan	Realisasi Jumlah Sisa Perkara Yang Diselesaikan	Realisasi Kinerja
18	18	18	100%

Adapun perhitungan persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah sebagai berikut :

$$\text{sisa perkara yang diselesaikan} = \frac{\text{jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$$

Sehingga hasil perhitungannya adalah :

$$\text{sisa perkara yang diselesaikan} = \frac{18}{18} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, dapat kita peroleh Pengukuran Kinerja pada Indikator Kinerja Utama Sisa Perkara Yang Diselesaikan. Perhitungan Pengukuran Kinerja untuk indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

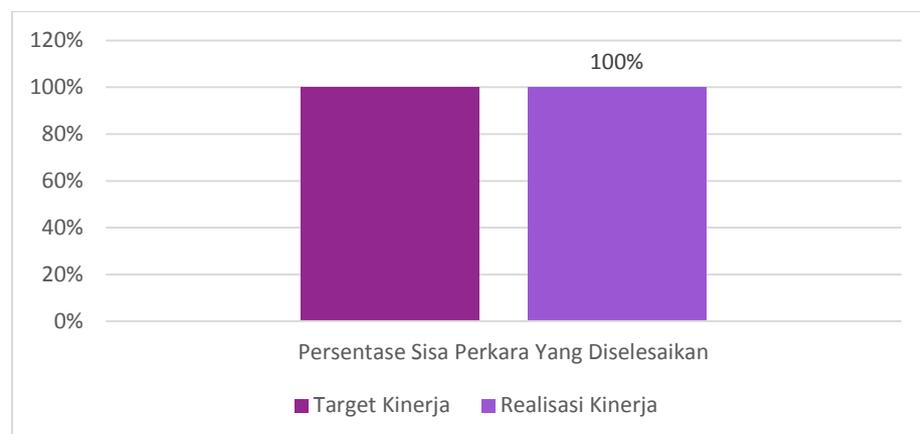
$$\begin{aligned} \text{Pengukuran Kinerja} &= \frac{\text{realisasi kinerja}}{\text{target kinerja}} \times 100 \% \\ &= \frac{100\%}{100\%} \times 100 \% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Adapun rincian pengukuran kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5. Pengukuran Kinerja pada IKU Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Pengukuran Kinerja (Capaian Kinerja)
Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan	100%	100%	100%

Berdasarkan hasil pengukuran tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengukuran Capaian Kinerja pada Indikator Kinerja Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2022 adalah 100% (seratus persen). Berikut adalah grafik perbandingan target kinerja dan realisasi kinerja :



Grafik 3.4. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

b) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah.

Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara-perkara yang telah diselesaikan sampai dengan minutas, dengan ketentuan penyelesaian perkara Gugatan < 5 bulan (kurang dari 5 bulan) (150 Hari Kalender), penyelesaian perkara Permohonan UU AP < 35 Hari (kurang dari 35 hari), dan penyelesaian perkara Gugatan KIP < 74 Hari (kurang dari tujuh puluh empat hari).

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tahun 2022 memiliki sisa perkara tahun 2021 sebanyak 18 (delapan belas) perkara, dan perkara masuk tahun 2022 sebanyak 45 (empat puluh lima) perkara gugatan dan 1 (satu) perkara Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dari jumlah tersebut perkara yang telah putus dan cabut pada tahun 2022 sebanyak 49 (empat puluh sembilan) perkara, dan sisa perkara tahun 2022 sebanyak 18 (delapan belas) perkara.

Dari 49 (empat puluh sembilan) perkara yang putus sampai dengan minutas, jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu (0-5 bulan) pada tahun 2022 ada 38 (tiga puluh delapan) perkara, sedangkan jumlah perkara yang tidak tepat waktu (lama proses lebih dari 5 bulan) ada 11 (sebelas) perkara. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat Waktu adalah 77,55% (tujuh puluh tujuh koma lima lima persen).

Rincian jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6. Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Jumlah Perkara Putus Tahun 2022	Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu (Gugatan < 150 Hari, Permohonan UU AP < 35 Hari, Gugatan KIP < 74 Hari)	Perkara Yang Diselesaikan Tidak Tepat Waktu	Persentase Realisasi Kinerja
49	38	11	77,55%

Persentase tersebut didapat dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut :

Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu =

$$\frac{\text{Jumlah perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara TUN yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Sehingga hasil perhitungannya adalah :

$$\begin{aligned} \text{Persentase Perkara Yang Diselesaikan} &= \frac{38}{49} \times 100\% \\ &= 77,55\% \end{aligned}$$

Realisasi Kinerja sebesar 77,55% (tujuh puluh tujuh koma lima lima persen) tersebut melebihi Target Kinerja sebesar 75% (tujuh puluh lima persen), dan menjadi suatu keberhasilan atas kinerja yang telah dilaksanakan

Pengukuran kinerja dapat dihitung dengan membandingkan realisasi kinerja dan target kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

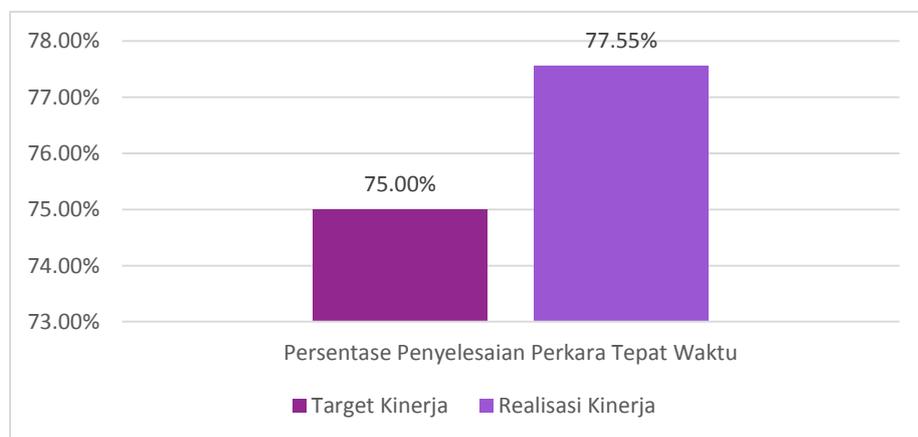
$$\begin{aligned} \text{Pengukuran Kinerja} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100 \% \\ &= \frac{77,55\%}{75\%} \times 100 \% \\ &= 103,4\% \end{aligned}$$

Adapun rincian pengukuran kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7. Pengukuran Kinerja pada IKU
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Pengukuran Kinerja
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	75%	77,55%	103,4%

Pengukuran Capaian kinerja pada indikator kinerja Persentase Penyelesaian Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2022 adalah 103,4% (seratus tiga koma empat persen). Hasil pengukuran ini menunjukkan realisasi kinerja melebihi dari target kinerja yang diharapkan. Berikut adalah grafik perbandingan target kinerja dan realisasi kinerja :



Grafik 3.5. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu

c) *Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding*

Indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding adalah perbandingan antara jumlah perkara tingkat pertama yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang telah diputus. Jumlah putusan perkara tingkat pertama pada Tahun 2022 adalah 49 (empat puluh sembilan) perkara, yang mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2022 ada 21 (dua puluh satu) perkara dan yang tidak mengajukan upaya hukum Banding pada Tahun 2022 ada 28 (dua puluh dua) perkara. Rincian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.8. Perbandingan Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Jumlah Perkara Yang Diputus di Tingkat Pertama

	Perkara Yang Diputus di Tingkat Pertama Tahun 2022	Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum Banding	Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Persentase Realisasi Kinerja
Jumlah perkara	49	21	28	57,14

Dari tabel tersebut, Persentase Realisasi Kinerja adalah 57,14% (lima puluh tujuh koma satu empat persen).

Perhitungan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dapat dihitung dengan rumus :

$$= \frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100 \%$$

Sehingga hasil perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\frac{28}{49} \times 100 \% = 57,14 \%$$

Untuk Pengukuran Capaian kinerja dapat dihitung dengan membandingkan realisasi kinerja dan target kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

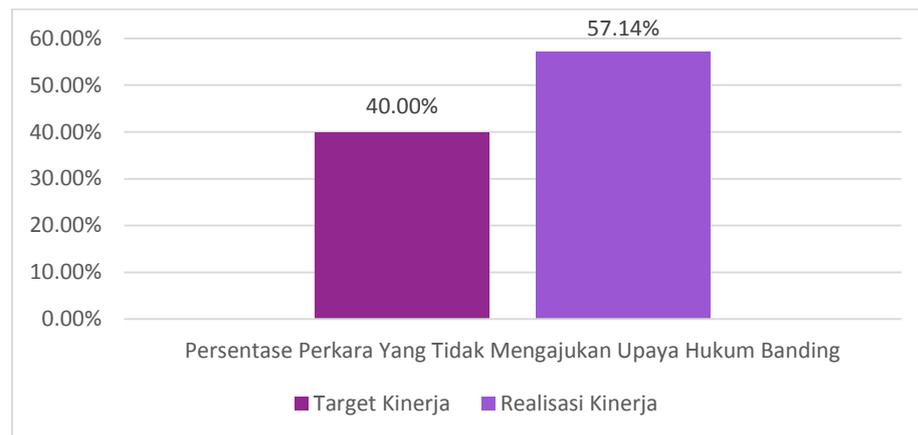
$$\begin{aligned} \text{Pengukuran Kinerja} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100 \% \\ &= \frac{57,14\%}{40\%} \times 100 \% \\ &= 142,85\% \end{aligned}$$

Adapun rincian pengukuran kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9. Pengukuran Kinerja pada IKU Tahun 2021
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Pengukuran Kinerja
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	40%	57,14%	142,85%

Hasil Pengukuran Kinerja pada indikator kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Tahun 2022 adalah 142,85% (seratus empat puluh dua koma delapan lima persen). Dari hasil pengukuran kinerja dapat dilihat bahwa Realisasi Kinerja melebihi dari Target Kinerja yang telah ditetapkan. Berikut adalah grafik perbandingan target kinerja dan realisasi kinerja :



Grafik 3.6 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

d) *Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi*

Indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dengan jumlah perkara yang telah diputus pada tingkat banding.

Jumlah perkara tingkat pertama yang diajukan banding dan telah diputus pada tingkat banding Tahun 2022 adalah 22 (dua puluh dua) perkara, jumlah perkara yang dimohonkan kasasi pada tahun 2022 ada 14 (empat belas) perkara, sedangkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada Tahun 2022 ada 8 (delapan) perkara.

Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10. Perbandingan Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kassai dan Jumlah Perkara Yang Telah Diputus di Tingkat Banding

	Perkara Tingkat Pertama Yang Dimohonkan Banding dan Telah Diputus	Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Persentase Realisasi Kinerja
Jumlah perkara	22	14	8	36,36%

Realisasi Kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2022 adalah 36,36% (tiga puluh enam koma tiga enam persen).

Perhitungan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dapat dihitung dengan rumus :

$$= \frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100 \%$$

Sehingga hasil perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\frac{8}{22} \times 100 \% = 36,36\%$$

Realisasi Kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2022 sebesar 36,36% (tiga puluh enam koma tiga enam persen) tersebut berada diatas target kinerja yang telah ditetapkan yaitu sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Untuk Pengukuran Capaian kinerja dapat dihitung dengan membandingkan realisasi kinerja dan target kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

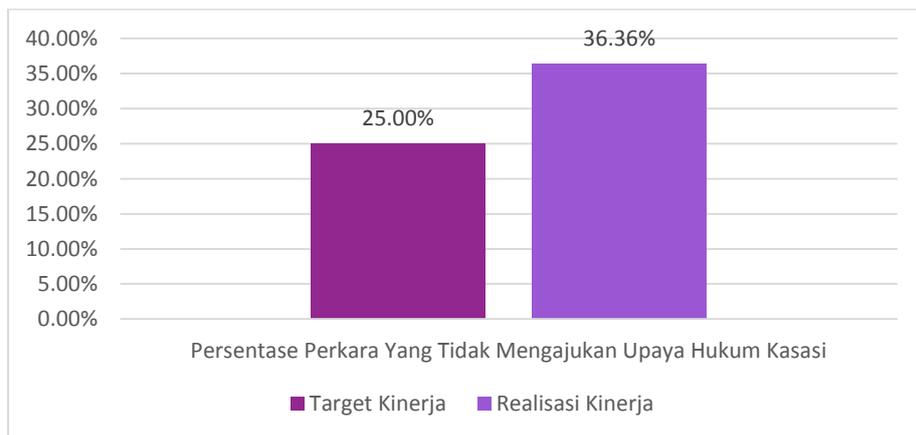
$$\begin{aligned} \text{Pengukuran Kinerja} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100 \% \\ &= \frac{36,36\%}{25\%} \times 100 \% \\ &= 145,44\% \end{aligned}$$

Adapun rincian pengukuran kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11. Pengukuran Kinerja pada IKU
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Pengukuran Kinerja
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	25%	36,36%	145,44%

Hasil Pengukuran Kinerja pada indikator kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada Tahun 2022 adalah 145,44% (seratus empat puluh lima koma empat empat persen). Dari hasil pengukuran kinerja dapat dilihat bahwa Realisasi Kinerja melebihi dari Target Kinerja yang telah ditetapkan. Berikut adalah grafik perbandingan target kinerja dan realisasi kinerja :



Grafik 3.7. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

e) *Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK*

Indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) dengan jumlah perkara yang telah diputus pada tingkat kasasi.

Jumlah perkara yang dimohonkan Kasasi dan telah diputus pada Tahun 2022 adalah 17 (tujuh belas) perkara, dan yang tidak mengajukan upaya hukum PK pada

Tahun 2021 ada 2 (dua) perkara, sementara yang tidak mengajukan upaya hukum PK ada 15 (lima belas) perkara.

Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.12. Perbandingan Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK dan Jumlah Perkara Yang Telah Diputus di Tingkat Kasasi

	Perkara yang dimohonkan Kasasi dan telah diputus	Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum PK	Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK	Persentase Realisasi Kinerja
Jumlah perkara	17	2	15	88,24%

Realisasi Kinerja Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK sebesar 88,24% (delapan puluh delapan koma dua empat persen).

Perhitungan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dapat dihitung dengan rumus :

$$= \frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100 \%$$

Sehingga hasil perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\frac{15}{17} \times 100 \% = 88,24 \%$$

Realisasi Persentase Perkara Yang Tidak Diajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali pada Tahun 2021 adalah 88,24% (delapan puluh delapan koma dua empat persen) tersebut melebihi target kinerja yang telah ditetapkan yaitu sebesar 60% (enam puluh persen).

Untuk Pengukuran Capaian kinerja dapat dihitung dengan membandingkan realisasi kinerja dan target kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Pengukuran Kinerja} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100 \% \\ &= \frac{88,24\%}{60\%} \times 100 \% \\ &= 147,07\% \end{aligned}$$

Adapun rincian pengukuran kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13. Pengukuran Kinerja pada IKU
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Pengukuran Kinerja
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK	60%	88,24%	147,07%

Hasil Pengukuran Kinerja pada indikator kinerja Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Tahun 2022 adalah 147,07% (seratus empat puluh tujuh koma nol tujuh persen). Dari hasil pengukuran kinerja dapat dilihat bahwa Realisasi Kinerja melebihi dari Target Kinerja yang telah ditetapkan. Berikut adalah grafik perbandingan target kinerja dan realisasi kinerja :



Grafik 3.8. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK

f) *Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan*

Perhitungan Index Responden Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan mengacu pada Keputusan Permenpan Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dalam perhitungan index kepuasan pencari keadilan, Nilai Persepsi minimal 3 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 62.51 .

Ada 11 unsur/aspek pelayanan publik dan 25 Unsur yang menjadi objek penilaian yaitu :

1. Fasilitas Pengadilan
 - a. Fasilitas Informasi (U1)
 - b. Fasilitas Toilet (U2)
 - c. Parkir Kendaraan (U3)
 - d. Kebersihan (U4)
 - e. Taman (U5)
 - f. Sarana Ibadah (U6)
 - g. Kantin (U7)
2. Pendaftaran
 - a. Sistem Pembayaran (U8)
 - b. Pelayanan Pendaftaran (U9)
3. Persidangan
 - a. Persiapan Persidangan (U10)
 - b. Fasilitas Ruang Sidang (U11)
 - c. Proses Persidangan (U12)
 - d. Waktu Pemeriksaan (U13)
 - e. Pemeriksaan Setempat (U14)
4. Hakim
 - a. Profesionalitas Hakim (U15)
5. Pemberian Salinan Putusan (U16)
6. Pelayanan Informasi (U17)
7. Pelayanan Pengaduan (U18)
8. Pelayanan Persuratan (U19)
9. Pengembalian Sisa Panjar (U20)
10. Permohonan Sisa Panjar (U21)
11. Permohonan Eksekusi (U22)
12. Apartur Pengadilan
 - a. Sikap Petugas (U23)
 - b. Kemampuan Pengetahuan Petugas (U24)
 - c. Penampilan Petugas (U25)

Skala penilaian terhadap masing-masing unsur menggunakan skema *likert*, dengan nilai terendah = 1 (satu) sampai dengan nilai tertinggi = 4 (empat).

Nilai IKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan index kepuasan masyarakat terhadap 25 sub-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Bobot Nilai rata-rata tertimbang dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot Nilai rata - rata tertimbang} = \frac{\text{jumlah bobot}}{\text{jumlah unsur}} = \frac{1}{25} = 0.04$$

Catatan : jumlah bobot seluruh unsur tetap 1

Untuk mendapatkan nilai IKM digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 sampai dengan 100, nilai tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25.

Nilai Konversi IKM = IKM x 25

$$\text{Catatan : Nilai dasar} = \frac{\text{jumlah nilai}}{\text{skala nilai tertinggi}} = \frac{100}{4} = 25$$

Nilai perhitung pengolahan index tersebut dikonversikan untuk memperoleh Nilai Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan. Konversi nilai index tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14. Mutu Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1.00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak Baik
2	1.76 – 2.50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
4	3,26 – 4.00	81,26 – 100	A	Sangat Baik

Untuk menghitung tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berdasarkan jumlah responden dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Indeks Kepuasan Pencari Keadilan} = \frac{\text{jumlah responden yang puas terhadap layanan peradilan}}{\text{jumlah responden}} \times 100\%$$

Adapun tabel tingkat kepuasan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15. Tingkat Kepuasan

Nilai	Tingkat Kepuasan	Keterangan
1	Kurang Puas	Tidak Puas
2	Cukup Puas	Puas
3	Puas	
4	Sangat Puas	

Jumlah responden yang mengisi kuisioner Indeks Kepuasan Masyarakat Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2022 ada 40 (empat puluh) responden. Responden tersebut terdiri dari berbagai unsur lapisan masyarakat. Adapun Rincian Pengolahan Index Kepuasan Masyarakat dapat dilihat pada lampiran laporan kinerja ini.

Dari perhitungan pengolahan index diatas, Nilai Index Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada Tahun 2022 adalah **84,45 (Delapan Puluh Empat Koma Empat Lima)**. Setelah dikonversikan dalam Tabel mutu diatas, Nilai Mutu Pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada Tahun 2022 adalah **A**, sehingga Kinerja Unit Pelayanan pada Pengadilan adalah **Sangat Baik**.

Nilai Index Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 tersebut sedikit lebih rendah dari Nilai Index Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 yang mencapai 85,72 (delapan puluh lima koma tujuh dua).

Untuk mengukur Tingkat Kepuasan Masyarakat dengan jumlah responden sebanyak 40 (empat puluh) responden berdasarkan nilai tiap responden terhadap tiap-tiap unsur pelayanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Adapun Rincian Perhitungan Tingkat Kepuasan Masyarakat dapat dilihat pada lampiran laporan kinerja ini.

Dari hasil pengukuran Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengadilan Pada Tahun 2022, dari 40 (empat puluh) responden yang mengisi survey diketahui sebanyak 100% responden merasa puas dengan pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Tabel 3.16. Tingkat Kepuasan Masyarakat Tiap Responden

PUAS	Responden dengan Tingkat Kepuasan Kurang Puas	0	0.00%	Reponden Tidak Puas	0	0.00%
	Responden dengan Tingkat Kepuasan Cukup Puas	0	4,55%		Responden Puas	40
TIDAK PUAS	Responden dengan Tingkat Kepuasan Puas	11	22,73%			
	Responden dengan Tingkat Kepuasan Sangat Puas	29	72,73%			

Dari tabel tingkat kepuasan per responden diatas maka dapat diukur, dari 40 (empat puluh) Responden, terdapat 40 (empat puluh) responden yang masuk dalam kategori puas atau 100 %(seratus persen), dan tidak ada responden yang merasa tidak puas 0% (nol persen).

Untuk menghitung persentase Index Responden Pencari Keadilan dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Index Kepuasan Pencari Keadilan} = \frac{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas}}{\text{Jumlah Responden}} \times 100 \%$$

Sehingga hasil perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\frac{40}{40} \times 100 \% = 100 \%$$

Realisasi Persentase Index Responden Pencari Keadilan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2022 adalah 100% (seratus persen). Realisasi Kinerja tersebut berada diatas Target Kinerja sebesar 80% (delapan puluh persen).

Dari tabel diatas terdapat 29 (dua puluh sembilan) responden merasa sangat puas, dan 11 (sebelas) responden merasa puas. Untuk itu masih diperlukan upaya-upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat agar tingkat kepuasan masyarakat semakin tinggi.

Untuk mengukur Capaian kinerja dapat dihitung dengan membandingkan realisasi kinerja dan target kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Pengukuran Kinerja} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100 \% \\ &= \frac{100\%}{80\%} \times 100 \% \\ &= 125\% \end{aligned}$$

Adapun rincian pengukuran kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.17. Pengukuran Kinerja pada IKU

Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Pengukuran Kinerja
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	80%	100%	125%

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja pada indikator kinerja Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2021 adalah 125% (seratus dua puluh lima persen). Dari hasil pengukuran kinerja dapat dilihat bahwa Realisasi Kinerja melebihi dari Target Kinerja yang telah ditetapkan. Berikut adalah grafik perbandingan target kinerja dan realisasi kinerja :



Grafik 3.9. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

2) Sasaran Kinerja : Peningkatan Efektivitas dan Pengelolaan Penyelesaian Perkara

a) Persentase Salinan Putusan Perkara TUN Yang Dikirim Para Pihak Tepat Waktu

Indikator Kinerja Persentase salinan putusan perkara TUN yang dikirim kepada para pihak tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan pada pengadilan tingkat pertama. Dasar pengiriman salinan putusan yang dikirim kepada para pihak yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.

Jumlah Putusan Yang Diterima Tepat Waktu pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2022 adalah 49 (empat puluh sembilan) putusan, sementara jumlah salinan putusan yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu ada 35 (tiga puluh lima) putusan. Rincian perbandingan jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dan jumlah putusan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18. Perbandingan Jumlah Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu dan Jumlah Putusan Tingkat Pertama Tahun 2022

	Salinan Putusan Yang Dikirimkan Kepada Para Pihak Tepat Waktu	Jumlah Putusan Tingkat Pertama	Persentase Realisasi Kinerja
Jumlah putusan	35	49	71,43%

Perhitungan persentase perbandingan tersebut menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan Yang Diterima Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100 \%$$

Sehingga hasil perhitungannya adalah :

$$= \frac{35}{49} \times 100 \%$$

$$= 71,43 \%$$

Realisasi Kinerja Persentase Salinan Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2022 adalah 71,43% (tujuh puluh satu koma empat tiga persen).

Pengukuran kinerja dapat dihitung dengan membandingkan realisasi kinerja dan target kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Pengukuran Kinerja} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100 \% \\ &= \frac{71,43\%}{100\%} \times 100 \% \\ &= 71,43\% \end{aligned}$$

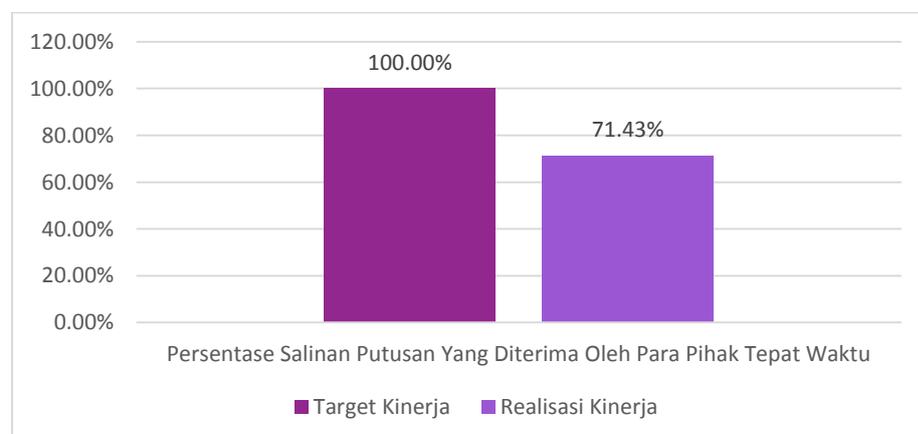
Adapun rincian pengukuran capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.19. Pengukuran Kinerja pada IKU

Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Pengukuran Kinerja
Persentase Salinan Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	71,43%	71,43%

Pengukuran Capaian kinerja pada indikator kinerja Persentase Salinan Putusan Yang Diterima Tepat Waktu pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2022 adalah 71,43% (tujuh puluh satu koma empat tiga persen). Dari hasil pengukuran kinerja dapat dilihat bahwa Realisasi Kinerja berada dibawah Target Kinerja yang telah ditetapkan. Berikut adalah grafik perbandingan target kinerja dan realisasi kinerja :



Grafik 3.10. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Persentase Salinan Putusan Yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu

b) Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK

Indikator kinerja Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK adalah perbandingan antara jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK.

Jumlah berkas perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2022 ada 42 (empat puluh dua) berkas perkara, dengan rincian ada 20 (dua puluh) berkas perkara Banding, 15 (lima belas) berkas perkara Kasasi, dan 7 (tujuh) berkas perkara Peninjauan Kembali (PK).

Sedangkan jumlah berkas perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2022 ada 38 (tiga puluh delapan) berkas perkara, dengan rincian ada 18 (delapan belas) berkas perkara Banding, 13 (tiga belas) berkas perkara Kasasi, dan 7 (empat) berkas perkara Peninjauan Kembali (PK). Rincian perbandingan berkas perkara yang diajukan dan berkas perkara yang dimohonkan untuk Banding, Kasasi dan PK adalah sebagai berikut :

Tabel 3.20. Data Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi, PK Yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu

DATA BERKAS PERKARA YANG DIMOHONKAN BANDING, KASASI, PK YANG DIAJUKAN SECARA LENGKAP DAN TEPAT WAKTU			
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA			
TAHUN 2021			
No.	Uraian	Jumlah Perkara yang Dimohonkan	Jumlah Perkara yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
1	Banding	20	18
2	Kasasi	15	13
3	Peninjauan Kembali	7	7
	Total	42	38

Perhitungan Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK dengan rumus berikut ini :

$$= \frac{\text{Jumlah Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat Waktu}}{\text{Jumlah Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$$

Sehingga perhitungan Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding Kasasi dan PK adalah :

$$= \frac{38}{42} \times 100 \%$$

$$= 90,7 \%$$

Realisasi Kinerja Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Tahun 2022 adalah 90,47% (sembilan puluh koma empat tujuh persen).

Pengukuran kinerja dapat dihitung dengan membandingkan realisasi kinerja dan target kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Pengukuran Kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100 \%$$

$$= \frac{90,47\%}{90\%} \times 100 \%$$

$$= 100,52\%$$

Rincian pengukuran capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.21. Pengukuran Kinerja pada IKU

Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Pengukuran Kinerja
Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	90%	90,47%	100,52%

Pengukuran Capaian kinerja pada indikator kinerja Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2021 adalah 100,52% (seratus koma lima dua persen). Dari hasil pengukuran kinerja dapat dilihat bahwa Realisasi Kinerja sedikit lebih tinggi dari Target Kinerja yang telah ditetapkan. Berikut adalah grafik perbandingan target kinerja dan realisasi kinerja :



Grafik 3.11. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

c) **Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara Online dalam waktu 1 Hari setelah putus**

Indikator Kinerja Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 (satu) hari setelah putus adalah perbandingan antara jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 (satu) hari setelah putus dengan jumlah perkara yang menarik perhatian masyarakat. Perkara yang menarik perhatian masyarakat seperti perkara-perkara yang menarik massa dan media.

Pada Tahun 2022, terdapat 4 (empat) perkara Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat (Media) yang diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Rincian tabel perbandingan jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 (satu) hari setelah putus pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.22. Perbandingan Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 (satu) hari setelah putus dan Jumlah Perkara Yang Menarik Perhatian

	Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 (satu) hari setelah putus	Putusan perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat
Jumlah	3	4

Perhitungan Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah putus}}{\text{Jumlah Perkara yang menarik perhatian masyarakat}} \times 100 \%$$

Sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\frac{3}{4} \times 100 \% = 75 \%$$

Realisasi kinerja Persentase Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 (satu) hari setelah putus pada Tahun 2022 adalah 75% (tujuh puluh lima persen).

Pengukuran kinerja dapat dihitung dengan membandingkan realisasi kinerja dan target kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

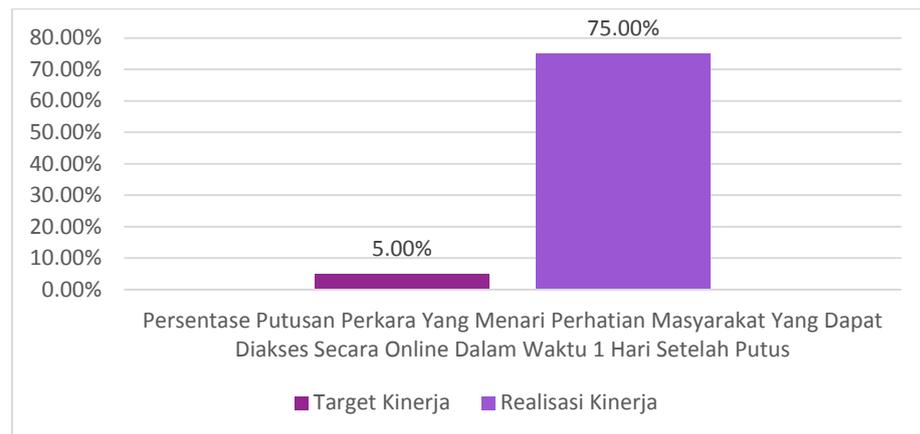
$$\begin{aligned} \text{Pengukuran Kinerja} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100 \% \\ &= \frac{75\%}{5\%} \times 100 \% \\ &= 1500\% \end{aligned}$$

Rincian pengukuran capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.23. Pengukuran Kinerja pada IKU Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 (satu) hari setelah putus

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Pengukuran Kinerja
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 (satu) hari setelah putus	5%	75%	1500%

Pengukuran Capaian kinerja pada indikator kinerja Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 (satu) hari setelah putus pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2022 adalah 1500% (Seribu Lima Ratus Persen). Dari hasil pengukuran kinerja dapat dilihat bahwa Realisasi Kinerja jauh lebih tinggi dari Target Kinerja yang telah ditetapkan. Berikut adalah grafik perbandingan target kinerja dan realisasi kinerja :



Grafik 3.12. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dan Tepat Waktu

3) Sasaran Kinerja : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

a) Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Indikator Kinerja Persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo.

Pada Tahun 2022, tidak terdapat Perkara Prodeo yang masuk dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Rincian tabel perbandingan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.24. Perbandingan Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan dan Jumlah Perkara Prodeo

	Perkara Prodeo Yang Diselesaikan	Perkara Prodeo
Jumlah	0	0

Perhitungan Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo Yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100 \%$$

Sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\frac{0}{0} \times 100 \% = 0 \%$$

Realisasi kinerja Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Tahun 2022 adalah 0% (nol persen).

Pengukuran kinerja dapat dihitung dengan membandingkan realisasi kinerja dan target kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Pengukuran Kinerja} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100 \% \\ &= \frac{0\%}{100\%} \times 100 \% \\ &= 0\% \end{aligned}$$

Rincian pengukuran capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.25. Pengukuran Kinerja pada IKU Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Pengukuran Kinerja
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	0%	0%

Pengukuran Capaian kinerja pada indikator kinerja Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2022 adalah 0% (Nol Persen). Dari hasil pengukuran kinerja dapat dilihat bahwa Realisasi Kinerja jauh lebih rendah dari Target Kinerja yang telah ditetapkan. Berikut adalah grafik perbandingan target kinerja dan realisasi kinerja :



Grafik 3.13. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

b) Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Indikator kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2022 adalah sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang, dan jumlah pencari keadilan golongan tertentu adalah sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang.

Rincian perbandingan Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan Jumlah pencari keadilan golongan tertentu tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.26. Perbandingan Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dan Jumlah pencari keadilan golongan tertentu

Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (orang)	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu (orang)
35	35

Perhitungan Realisasi Kinerja Persentase Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum menggunakan rumus berikut ini:

$$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100 \%$$

Sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$= \frac{35}{35} \times 100 \%$$

$$= 100 \%$$

Realisasi Kinerja Persentase Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2022 adalah 100% (seratus persen).

Pengukuran kinerja dapat dihitung dengan membandingkan realisasi kinerja dan target kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Pengukuran Kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100 \%$$

$$= \frac{100\%}{100\%} \times 100 \%$$

$$= 100\%$$

Rincian pengukuran capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.27. Pengukuran Kinerja pada IKU

Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan posbakum

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Pengukuran Kinerja
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

Pengukuran Capaian kinerja pada indikator kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2022 adalah 100% (Seratus Persen). Dari hasil pengukuran kinerja dapat dilihat bahwa Realisasi Kinerja dapat mencapai Target Kinerja yang telah ditetapkan. Berikut adalah grafik perbandingan target kinerja dan realisasi kinerja :



Grafik 3.13. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

4) Sasaran Kinerja : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

a) Persentase Jumlah Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Indikator Kinerja Persentase jumlah putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti adalah perbandingan antara putusan perkara TUN yang telah Berkekuatan Hukum Tetap yang dimohonkan eksekusi dan telah ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara TUN yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).

Jumlah putusan perkara TUN yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) pada Tahun 2022 sebanyak 55 (lima puluh lima) perkara, dan tidak terdapat putusan perkara TUN yang telah Berkekuatan Hukum Tetap yang telah ditindaklanjuti.

Rincian Perbandingan Jumlah Putusan Perkara TUN yang telah ditindaklanjuti dengan Jumlah Putusan Perkara TUN yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).

Tabel 3.28. Perbandingan Jumlah putusan perkara TUN yang telah ditindaklanjuti dengan dengan Jumlah Putusan perkara yang BHT

	Jumlah putusan perkara TUN yang BHT yang telah ditindaklanjuti	Jumlah putusan perkara TUN yang BHT
Jumlah	0	55

Perhitungan Realisasi Kinerja Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti menggunakan rumus berikut ini:

$$\frac{\text{Jumlah putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah putusan perkara yang BHT}} \times 100 \%$$

- Jumlah putusan yang BHT = putusan perkara yang sudah berkekuatan Hukum Tetap dan mempunyai nilai eksekutorial/executable)

Sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$= \frac{0}{55} \times 100 \%$$

$$= 0 \%$$

Realisasi Kinerja Persentase Putusan Perkara TUN Yang Ditindaklanjuti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2022 adalah 0% (nol persen).

Untuk Pengukuran Kinerjanya dapat dihitung dengan membandingkan realisasi kinerja dan target kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Pengukuran Kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100 \%$$

$$= \frac{0\%}{5\%} \times 100 \%$$

$$= 0\%$$

Rincian pengukuran capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.29. Pengukuran Kinerja pada IKU
Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Pengukuran Kinerja
Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti	5%	0%	0%

Pengukuran Capaian kinerja pada indikator kinerja Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2022 adalah 5% (lima persen). Dari hasil pengukuran kinerja dapat dilihat bahwa Realisasi Kinerja tidak dapat mencapai Target Kinerja yang telah ditetapkan. Berikut adalah grafik perbandingan target kinerja dan realisasi kinerja :



Grafik 3.15. Perbandingan Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti

b) *Persentase Jumlah Putusan Perkara TUN yang dimohonkan eksekusi (Dieksekusi)*

Indikator Kinerja Persentase jumlah putusan perkara TUN yang dimohonkan eksekusi adalah perbandingan antara jumlah putusan perkara TUN yang telah Berkekuatan Hukum Tetap yang dimohonkan eksekusi dengan jumlah putusan perkara TUN yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).

Jumlah putusan perkara TUN yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) pada Tahun 2022 sebanyak 55 (lima puluh lima) perkara, dan perkara TUN yang telah

Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) yang dimohonkan eksekusi pada tahun 2022 ada 4 (empat) perkara.

Rincian Perbandingan Jumlah Putusan Perkara TUN yang dimohonkan eksekusi dengan Jumlah Putusan Perkara yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3.30. Perbandingan Jumlah putusan perkara TUN yang dimohonkan eksekusi dengan dengan Jumlah Putusan perkara yang BHT

	Jumlah putusan perkara TUN yang BHT yang dimohonkan	Jumlah putusan perkara TUN yang BHT
Jumlah	4	55

Perhitungan Realisasi Kinerja Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti menggunakan rumus berikut ini:

$$\frac{\text{Jumlah putusan perkara TUN yang dimohonkan eksekusi}}{\text{jumlah putusan perkara yang BHT}} \times 100 \%$$

- Jumlah putusan yang BHT = putusan perkara yang sudah berkekuatan Hukum Tetap dan mempunyai nilai eksekutorial/executable)

Sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &= \frac{4}{55} \times 100 \% \\ &= 7,27 \% \end{aligned}$$

Realisasi Kinerja Persentase Putusan Perkara TUN Yang Dimohonkan Eksekusi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2022 adalah 7,27% (tujuh koma dua tujuh persen).

Pengukuran kinerja Persentase Putusan Perkara TUN yang dimohonkan eksekusi Tahun 2022 dapat dihitung dengan membandingkan realisasi kinerja dan target kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Pengukuran Kinerja} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100 \% \\
 &= \frac{7,27\%}{20\%} \times 100 \% \\
 &= 36,35\%
 \end{aligned}$$

Rincian pengukuran capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.31. Pengukuran Kinerja pada IKU
Persentase Putusan Perkara TUN yang dimohonkan eksekusi

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Pengukuran Kinerja
Persentase putusan perkara TUN yang dimohonkan eksekusi	20%	7,27%	36,35%

Pengukuran Capaian kinerja pada indikator kinerja Persentase Putusan Perkara TUN yang dimohonkan eksekusi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2022 adalah 36,35% (tiga puluh enam koma tiga lima persen). Dari hasil pengukuran kinerja dapat dilihat bahwa Realisasi Kinerja tidak dapat mencapai Target Kinerja yang telah ditetapkan. Berikut adalah grafik perbandingan target kinerja dan realisasi kinerja :



Grafik 3.16. Perbandingan Persentase Putusan Perkara TUN yang Dimohonkan Eksekusi

5) Sasaran Kinerja : Meningkatnya Transparansi Pengelolaan Keuangan dan Aset

a) Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Pegawai, Operasional, Pemeliharaan dan Belanja Modal

Indikator Kinerja Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Pegawai Modal, Operasional, Pemeliharaan dan Belanja Modal adalah perbandingan antara Realisasi Anggaran DIPA 01 dengan Jumlah Pagu Anggaran DIPA 01.

Pagu Anggaran DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2022 berdasarkan DIPA Nomor : SP DIPA-005.01.2.559857/2021 tanggal 17 November 2021 sampai dengan revisi terakhir adalah Rp.6.200.893.000,- (*Enam Miliar Dua Ratus Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah*).

Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun Anggaran 2022 Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.6.026.784.429,- (*Enam Miliar Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*) atau sebesar 97,19% (*sembilan puluh tujuh koma satu sembilan persen*). Rincian Perbandingan Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3.32. Perbandingan Target (Pagu Anggaran DIPA 01) dan Realisasi (Realisasi Anggaran DIPA 01)

	Pagu Anggaran DIPA 01 (setelah revisi)	Realisasi Anggaran DIPA 01
Jumlah	6.200.893.000	6.026.784.000

Perhitungan Realisasi Kinerja Persentase penyerapan anggaran belanja pegawai, operasional, pemeliharaan dan modal menggunakan rumus berikut ini:

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi DIPA 01}}{\text{jumlah Pagu DIPA}} \times 100 \%$$

Sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$= \frac{6.026.784.429}{6.200.893.000} \times 100 \%$$

$$= 97,19 \%$$

Realisasi Kinerja Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Pegawai, Operasional, Pemeliharaan dan Belanja Modal pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2022 adalah 97,19% (sembilan puluh tujuh koma satu sembilan persen).

Pengukuran kinerjanya dapat dihitung dengan membandingkan realisasi kinerja dan target kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

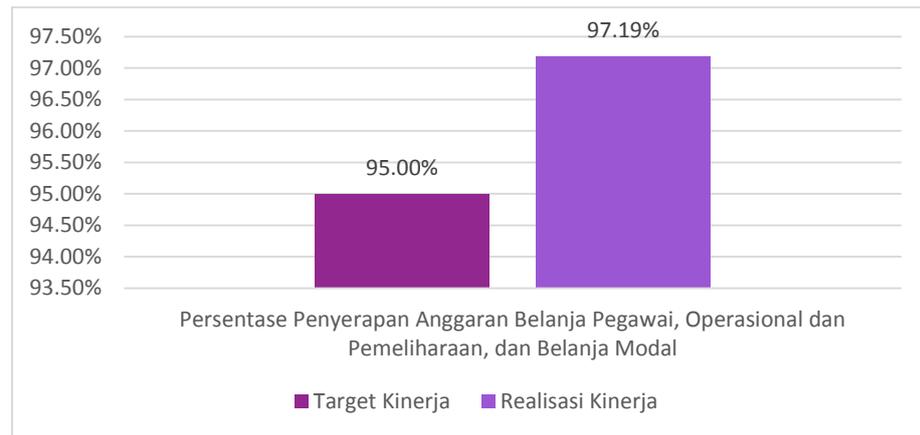
$$\begin{aligned} \text{Pengukuran Kinerja} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100 \% \\ &= \frac{97,19\%}{95\%} \times 100 \% \\ &= 102,31\% \end{aligned}$$

Rincian pengukuran capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.33. Pengukuran Kinerja pada IKU
Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Pegawai, Operasional, Pemeliharaan dan
Belanja Modal

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Pengukuran Kinerja
Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Pegawai, Operasional, Pemeliharaan dan Belanja Modal	95%	97,19%	102,31%

Pengukuran Capaian kinerja pada indikator kinerja Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Pegawai, Operasional, Pemeliharaan dan Belanja Modal pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2022 adalah 102,31% (seratus dua koma tiga satu persen). Dari hasil pengukuran kinerja dapat dilihat bahwa Realisasi Kinerja melebihi dari Target Kinerja yang telah ditetapkan. Berikut adalah grafik perbandingan target kinerja dan realisasi kinerja :



Grafik 3.17. Perbandingan Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Pegawai, Operasional dan Pemeliharaan, dan Belanja Modal

b) *Persentase Penyerapan Anggaran Manajemen Peradilan Militer dan TUN*

Indikator Kinerja Persentase Penyerapan Anggaran Manajemen Peradilan Militer dan TUN adalah perbandingan antara Realisasi Anggaran DIPA 05 dengan Jumlah Pagu Anggaran DIPA 05.

Pagu Anggaran DIPA 05 Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2022 berdasarkan DIPA DIPA Nomor : SP DIPA-005.05.2.559858./2022 tanggal 17 November 2021 sebesar Rp.36.500.000,- (*Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

Realisasi Anggaran DIPA 05 Tahun Anggaran 2022 Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 32.159.000,- (*Tiga Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah*). Rincian perbandingan Pagu Anggaran DIPA 05 dan Realisasi DIPA 05 Tahun 2022 dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3.34. Perbandingan Target (Pagu Anggaran DIPA 05) dan Realisasi (Realisasi Anggaran DIPA 05)

	Pagu Anggaran DIPA 05	Realisasi Anggaran DIPA 01
Jumlah	36.500.000	32.159.000

Perhitungan Realisasi Kinerja Persentase penyerapan anggaran manajemen peradilan militer dan TUN menggunakan rumus berikut ini:

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi DIPA 05}}{\text{jumlah Pagu DIPA 05}} \times 100 \%$$

Sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &= \frac{32.159.000}{36.500.000} \times 100 \% \\ &= 88,11 \% \end{aligned}$$

Realisasi Kinerja Persentase Penyerapan Anggaran Manajemen Peradilan Militer dan TUN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2022 adalah 88,11% (delapan puluh delapan koma sebelas persen).

Pengukuran kinerjanya dapat dihitung dengan membandingkan realisasi kinerja dan target kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

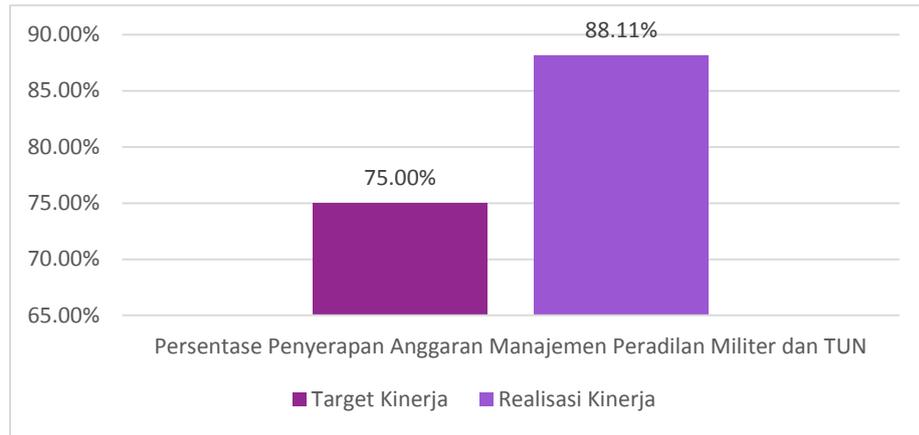
$$\begin{aligned} \text{Pengukuran Kinerja} &= \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100 \% \\ &= \frac{88,11\%}{75\%} \times 100 \% \\ &= 117,48\% \end{aligned}$$

Rincian pengukuran capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.35. Pengukuran Kinerja pada IKU
Persentase Penyerapan Anggaran Manajemen Peradilan Militer dan TUN

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Pengukuran Kinerja
Persentase Anggaran Manajemen Peradilan Militer dan TUN	75%	88,11%	117,48%

Pengukuran Capaian kinerja pada indikator kinerja Persentase Penyerapan Anggaran Manajemen Peradilan Militer dan TUN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2022 adalah 117,48% (seratus tujuh belas koma empat delapan persen). Dari hasil pengukuran kinerja dapat dilihat bahwa Realisasi Kinerja melebihi dari Target Kinerja yang telah ditetapkan. Berikut adalah grafik perbandingan target kinerja dan realisasi kinerja :



Grafik 3.18. Perbandingan Persentase Penyerapan Anggaran Manajemen Peradilan Militer dan TUN

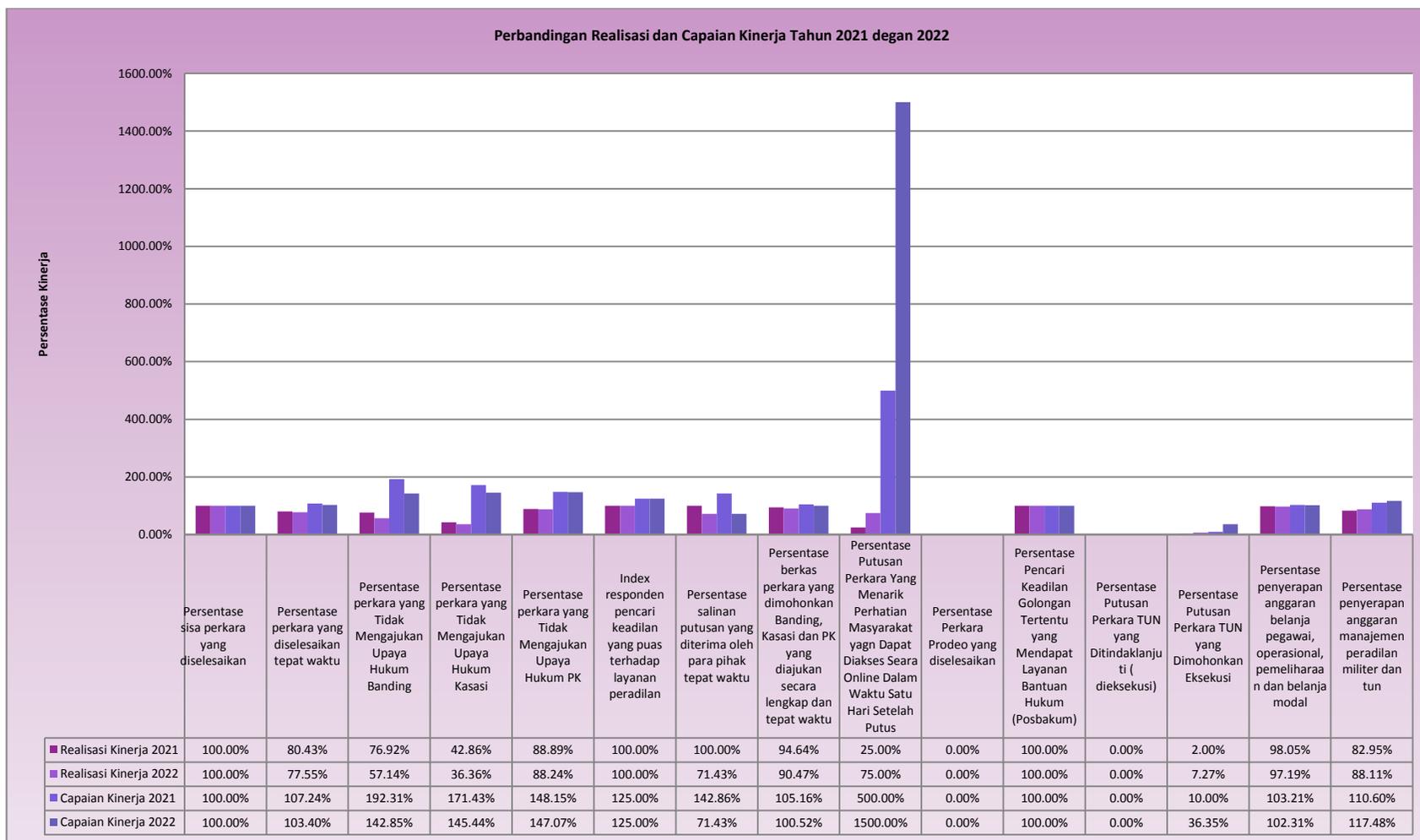
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

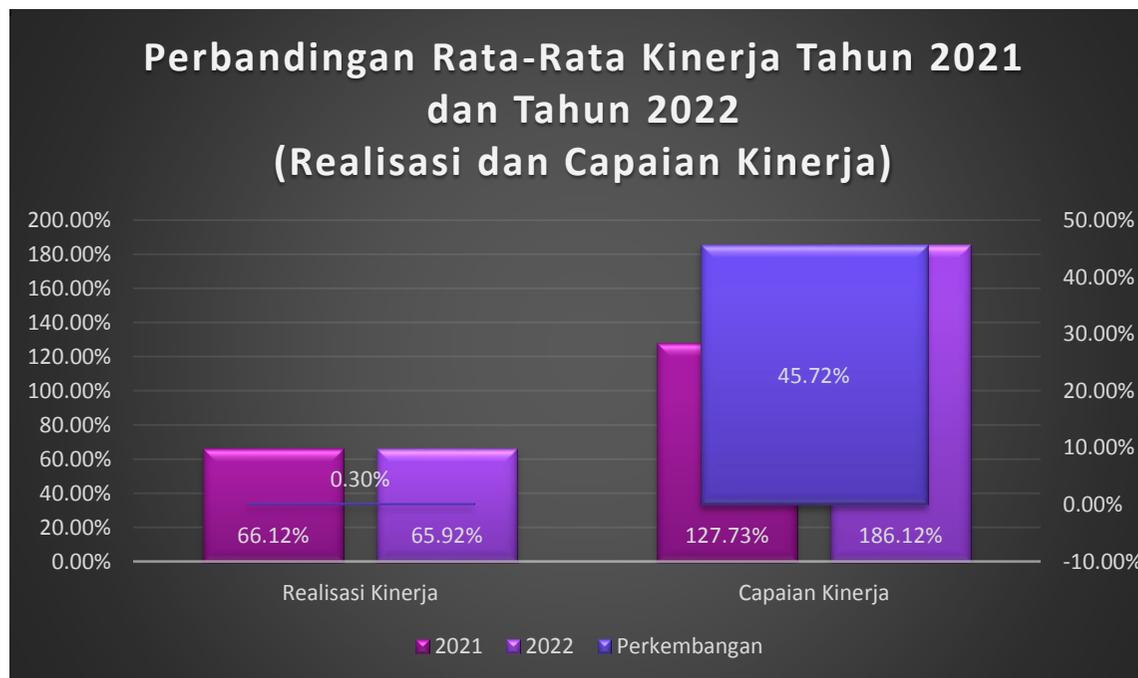
Untuk melihat perkembangan kinerja terhadap realisasi kinerja dan capaian kinerja pada Tahun 2022 diperlukan perbandingan realisasi dan capaian kinerja dengan tahun – tahun sebelumnya. Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Tahun 2022 dengan realisasi dan capaian kinerja Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini :

Tabel 3.36. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian
Tahun 2021 dengan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2021			Tahun 2022			Perkembangan Realisasi	Perkembangan Capaian	Keterangan
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian			
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	
	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	75%	80,43%	107,24%	75%	77,55%	103,40%	-3,58%	-3,58%	
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	40%	76,92%	192,31%	40%	57,14%	142,85%	-25,72%	-25,72%	
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	25%	42,86%	171,43%	25%	36,36%	145,44%	-15,16%	-15,16%	
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK	60%	88,89%	148,15%	60%	88,24%	147,07%	-0,73%	-0,73%	
	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	100,00%	125,00%	80%	100,00%	125,00%	0,00%	0,00%	
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	70%	100,00%	142,86%	100%	71,43%	71,43%	-28,57%	-50,00%	
	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	90%	94,64%	105,16%	90%	90,47%	100,52%	-4,41%	-4,41%	
	Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu Satu Hari Setelah Putus	5%	25,00%	500,00%	5%	75,00%	1500,00 %	200,00%	200,00%	
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	0,00%	0,00%	100%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100,00%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	5%	0,00%	0,00%	5%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	Persentase Putusan Perkara TUN yang Dimohonkan Eksekusi	20%	2,00%	10,00%	20%	7,27%	36,35%	263,50%	263,50%	
Meningkatnya transparansi pengelolaan keuangan dan aset	Persentase penyerapan anggaran belanja pegawai, operasional, pemeliharaan dan belanja modal	95%	98,05%	103,21%	95%	97,19%	102,31%	-0,88%	-0,88%	
	Persentase penyerapan anggaran manajemen peradilan militer dan tun	75%	82,95%	110,60%	75%	88,11%	117,48%	6,22%	6,22%	
Rata-Rata Kinerja		62,67%	66,12%	127,73%	64,67%	65,92%	185,12%	-0,30%	45,72%	

Grafik 3.19. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2022





Grafik 3.20. Perbandingan Rata -Rata Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2022

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dan Tahun Sebelumnya

Untuk melihat perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2021, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.37. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022 serta Perkembangannya

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2021	Realisasi Kinerja 2022	Perkembangan Realisasi Kinerja
Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100,00%	100,00%	0,00%
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80,43%	77,55%	-3,58%
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	76,92%	57,14%	-25,72%
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	42,86%	36,36%	-15,16%
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK	88,89%	88,24%	-0,73%
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100,00%	100,00%	0,00%
Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100,00%	71,43%	-28,57%
Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	94,64%	90,47%	-4,41%
Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu Satu Hari Setelah Putus	25,00%	75,00%	200,00%
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0,00%	0,00%	0,00%
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100,00%	100,00%	0,00%
Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	0,00%	0,00%	0,00%
Persentase Putusan Perkara TUN yang Dimohonkan Eksekusi	2,00%	7,27%	263,50%
Persentase penyerapan anggaran belanja pegawai, operasional, pemeliharaan dan belanja modal	98,05%	97,19%	-0,88%
Persentase penyerapan anggaran manajemen peradilan militer dan tun	82,95%	88,11%	6,22%
Rata-Rata Realisasi Kinerja	66,12%	65,92%	-0,30%

Dari tabel dan grafik diatas dilihat bahwa persentase rata-rata realisasi kinerja Tahun 2022 sebesar 65,92% (enam puluh lima koma sembilan dua persen) dengan, turun sebesar -0,30% (minus nol koma tiga nol persen) dari rata-rata realisasi kinerja Tahun 2021 yang mencapai 66,12% (enam puluh enam koma satu dua persen).

Indikator Kinerja yang mengalami kenaikan realisasi kinerja adalah :

1. Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu satu hari setelah putus.
2. Persentase Putusan Perkara TUN yang Dimohonkan Eksekusi.
3. Persentase Penyerapan Anggaran Manajemen Peradilan Militer dan TUN.

Indikator Kinerja yang mengalami penurunan realisasi kinerja adalah :

1. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu.
2. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.
3. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.
4. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK.
5. Persentase Salinan Putusan Yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu.
6. Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu.
7. Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Pegawai, Operasional dan Pemeliharaan, dan Belanja Modal.

Indikator Kinerja yang tidak mengalami perubahan realisasi kinerja adalah :

1. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan.
2. Persentase Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan.
3. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan.
4. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).
5. Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Di Eksekusi).

Indikator Kinerja yang realisasi kinerja masih 0% (nol persen) adalah :

1. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan.
2. Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Di Eksekusi).

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dan Tahun Sebelumnya

Untuk melihat perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2021, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.38. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022 serta Perkembangannya

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja 2021	Capaian Kinerja 2022	Perkembangan Capaian Kinerja
Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100,00%	100,00%	0,00%
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	107,24%	103,40%	-3,58%
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	192,31%	142,85%	-25,72%
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	171,43%	145,44%	-15,16%
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK	148,15%	147,07%	-0,73%
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	125,00%	125,00%	0,00%
Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	142,86%	71,43%	-50,00%
Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	105,16%	100,52%	-4,41%
Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu Satu Hari Setelah Putus	500,00%	1500,00%	200,00%
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0,00%	0,00%	0,00%
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100,00%	100,00%	0,00%
Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	0,00%	0,00%	0,00%
Persentase Putusan Perkara TUN yang Dimohonkan Eksekusi	10,00%	36,35%	263,50%
Persentase penyerapan anggaran belanja pegawai, operasional, pemeliharaan dan belanja modal	103,21%	102,31%	-0,87%
Persentase penyerapan anggaran manajemen peradilan militer dan tun	110,60%	117,48%	6,22%
Rata-Rata Capaian Kinerja	127,73%	186,12%	45,72%

Dari tabel diatas dapat dilihat, persentase rata-rata Capaian Kinerja Tahun 2022 adalah 232,65% (dua ratus tiga puluh dua koma enam lima persen) dengan 15 (lima belas) indikator kinerja, naik sebesar 45,72% (empat puluh lima koma tujuh dua persen) dari rata-rata capaian kinerja Tahun 2021 yang mencapai 159,66% (seratus lima puluh sembilan koma enam enam persen) dengan 15 (lima belas) indikator kinerja.

Indikator Kinerja yang mengalami kenaikan realisasi kinerja adalah :

1. Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu satu hari setelah putus.
2. Persentase Putusan Perkara TUN yang Dimohonkan Eksekusi.
3. Persentase Penyerapan Anggaran Manajemen Peradilan Militer dan TUN.

Indikator Kinerja yang mengalami penurunan realisasi kinerja adalah :

1. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu.
2. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.
3. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.
4. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK.
5. Persentase Salinan Putusan Yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu.
6. Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu.
7. Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Pegawai, Operasional dan Pemeliharaan, dan Belanja Modal.

Indikator Kinerja yang tidak mengalami perubahan realisasi kinerja adalah :

1. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan.
2. Persentase Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan.
3. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan.
4. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).
5. Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Di Eksekusi).

Indikator Kinerja yang realisasi kinerja masih 0% (nol persen) adalah :

1. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan.
2. Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Di Eksekusi).

3. Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah pada Dokumen Renstra

Untuk melihat perbandingan capaian kinerja antara Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat pada Rencana Strategis 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

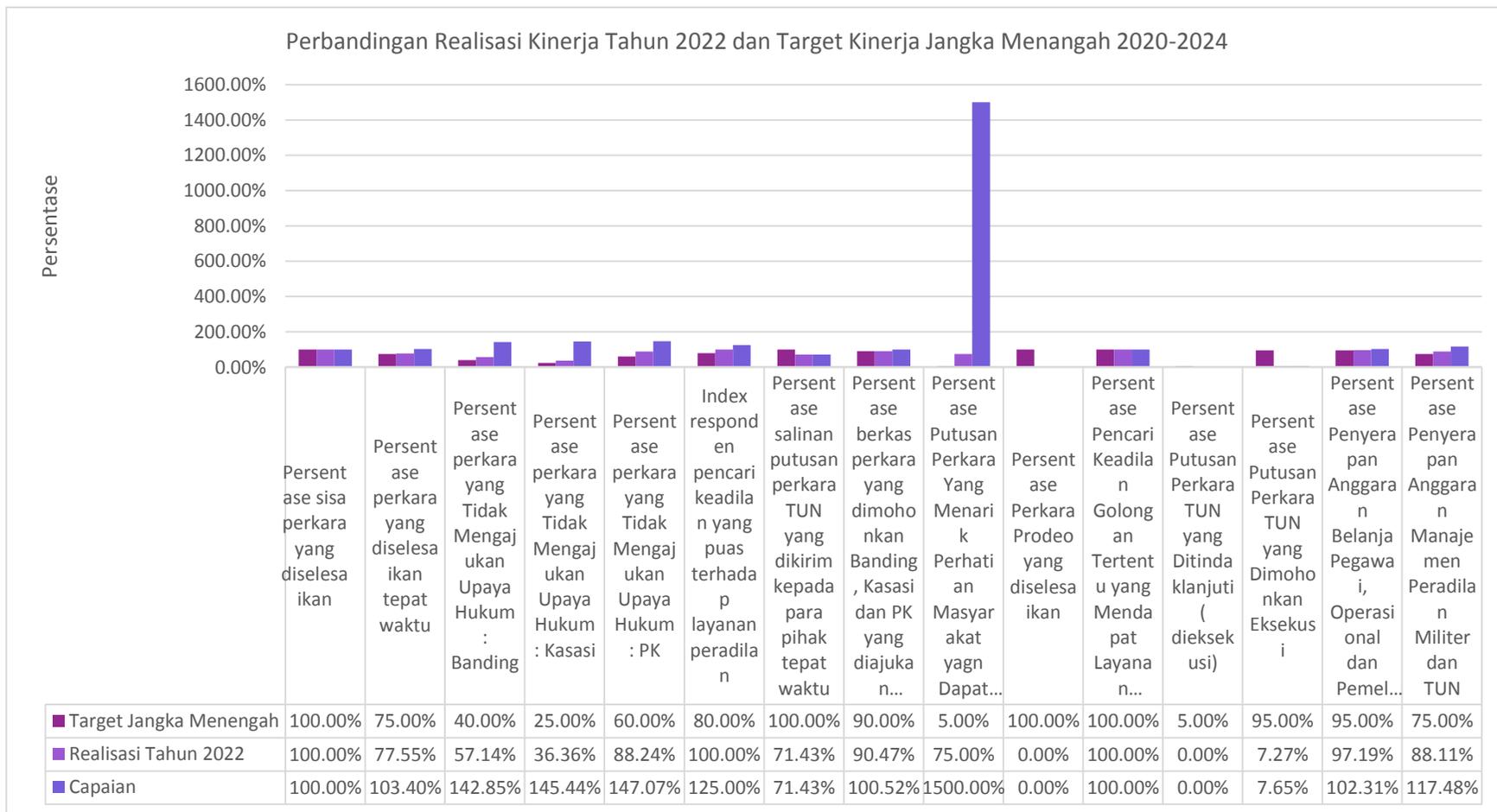
Tabel 3.39. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah Renstra 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Jangka Menengah	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100,00%	100,00%	100,00%
	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	75,00%	77,55%	103,40%
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : Banding	40,00%	57,14%	142,85%
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : Kasasi	25,00%	36,36%	145,44%
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : PK	60,00%	88,24%	147,07%
	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80,00%	100,00%	125,00%
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara TUN yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100,00%	71,43%	71,43%
	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	90,00%	90,47%	100,52%
	Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu Satu Hari Setelah Putus	5,00%	75,00%	1500,00%
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100,00%	0,00%	0,00%
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100,00%	100,00%	100,00%
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	5,00%	0,00%	0,00%
	Persentase Putusan Perkara TUN yang Dimohonkan Eksekusi	95,00%	7,27%	7,65%
Meningkatnya transparansi pengelolaan keuangan dan aset	Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Pegawai, Operasional dan Pemeliharaan, dan Belanja Modal	95,00%	97,19%	102,31%
	Persentase Penyerapan Anggaran Manajemen Peradilan Militer dan TUN	75,00%	88,11%	117,48%
Rata Rata Kinerja		69,67%	65,92%	94,62%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 65,92% (enam puluh lima koma sembilan dua persen) lebih rendah dari rata-rata target kinerja jangka menengah sebesar 69,67% (enam puluh sembilan koma enam tujuh persen), sehingga rata-rata capaian kinerja tahun 2022 terhadap target kinerja hanya sebesar 94,62% (sembilan puluh empat koma enam dua persen).

Grafik perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Grafik 3.20. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Target Kinerja Jangka Menengah 2020-2024



4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang diperlukan

Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja dapat dipengaruhi beberapa faktor, seperti peraturan/regulasi, kebijakan, sumber daya aparatur yang handal, lingkungan kerja yang kondusif, kepuasan masyarakat, dukungan anggaran yang memadai dan lain sebagainya.

Faktor penyebab keberhasilan dan peningkatan kinerja antara lain sebagai berikut :

1. Aparatur Pengadilan yang professional, disiplin dan berintegritas;
2. Kepedulian pimpinan dalam peningkatan performa kerja;
3. Adaptif terhadap perubahan, baik perubahan peraturan maupun pada sistem kerja yang lebih modern berbasis teknologi informasi;
4. Kontribusi masyarakat dalam pengisian survey dan saran/kritik yang membangun;
5. Pelaksanaan program kerja yang terencana dan terukur;
6. Tersedianya Dukungan Anggaran.

Faktor penyebab kegagalan dan penurunan kinerja antara lain sebagai berikut:

1. Pertambahan Perkara diakhir tahun yang secara waktu penyelesaiannya akan berlanjut ke tahun berikutnya;
2. Jumlah perkara tidak sebanding dengan jumlah Aparatur Pengadilan yang ada (Panitera Pengganti);
3. Target kinerja yang dirasa masih terlalu tinggi;
4. Para Pihak terutama yang tidak mengajukan upaya hukum seringkali tidak segera membayar untuk mengambil Salinan putusan resmi sebagaimana dengan ketentuan;
5. Berkas Perkara yang dimohonkan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK yang mendekati batas waktu permohonan, dan kelengkapan berkas perkara yang kurang sehingga mempengaruhi pengajuan berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum Banding, Kasasi, dan PK tersebut.

6. Putusan Pengadilan yang ditindaklanjuti tidak dilaporkan oleh Pihak (Tergugat) kepada Pengadilan, atau Pihak (Tergugat) tidak melaksanakan putusan yang bersifat eksekusi, dan kemampuan paksa pengadilan yang terbatas.
7. Ketiadaan perkara Prodeo, karena tidak ada pencari keadilan golongan tertentu yang mengajukan prodeo. Hal ini bisa terjadi karena ketidakpahaman masyarakat mengenai layanan bantuan hukum dan pembebasan biaya perkara, serta masih minimnya informasi layanan posbakum dan prodeo di Pengadilan.
8. Layanan Pengadilan yang masih harus ditingkatkan baik dalam pelayanan petugas, maupun sarana dan prasarana;

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. Berikut ini adalah analisis efisiensi penggunaan sumber daya terhadap sasaran strategis pada masing-masing indikator kinerja.

Tabel 3.40. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Efisiensi
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100,00%	100,00%	2.500.000	950.000	38,00%	62,00%
	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	75%	77,55%	103,40%	2.500.000	950.000	38,00%	63,25%
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : Banding	40%	57,14%	142,85%	2.500.000	950.000	38,00%	73,40%
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : Kasasi	25%	36,36%	145,44%	2.500.000	950.000	38,00%	73,87%
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : PK	60%	88,24%	147,07%	2.500.000	950.000	38,00%	74,16%
	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	100,00%	125,00%	319.536.000	318.012.113	99,52%	20,38%
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara TUN yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	71,43%	71,43%	2.500.000	950.000	38,00%	46,80%
	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	90%	90,47%	100,52%	2.500.000	950.000	38,00%	62,20%
	Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu Satu Hari Setelah Putus	5%	75,00%	1500,00%	2.500.000	950.000	38,00%	97,47%
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpunggir	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	0,00%	0,00%	1.000.000	-	0,00%	0,00%
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100,00%	100,00%	33.000.000	31.209.000	94,57%	5,43%
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	5%	0,00%	0,00%	2.500.000	950.000	38,00%	0,00%
	Persentase Putusan Perkara TUN yang Dimohonkan Eksekusi	20%	7,27%	36,35%	2.500.000	950.000	38,00%	-4,54%
Meningkatnya transparansi pengelolaan keuangan dan aset	Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Pegawai, Operasional dan Pemeliharaan, dan Belanja Modal	95%	97,19%	102,31%	6.200.893.000	6.026.784.429	97,19%	5,00%
	Persentase Penyerapan Anggaran Manajemen Peradilan Militer dan TUN	75%	88,11%	117,48%	36.500.000	32.159.000	88,11%	25,00%

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya adalah membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan. Pagu anggaran dan realisasi anggaran dikalkulasikan dari subkomponen-subkomponen yang menunjang indikator-indikator kinerja yang ada. Dari seluruh target kinerja pada tahun 2022, rata-rata realisasi kinerja adalah 65,92% (enam puluh lima koma sembilan dua persen) lebih tinggi dari rata-rata target kinerja yang berkisar 64,67% (enam puluh empat koma enam tujuh persen). Namun demikian tidak semua realisasi kinerja melebihi target kinerja.

Data pada tabel diatas merupakan efisiensi dari masing-masing indicator kinerja. Kita dapat mengambil contoh pada salah satu indikator kinerja, yaitu Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu. Realisasi Kinerja mencapai 77,55% (tujuh puluh tujuh koma lima lima persen) dan Target Kinerja adalah 75% (tujuh puluh lima persen), nilai Capaian Kinerjanya adalah 103,40% (seratus tiga koma empat nol persen). Pagu Anggaran Biaya Pengamanan Sidang adalah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Realisasi Anggaran Biaya Pengamanan Sidang adalah Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan persentase penyerapan anggaran adalah 38% (tiga puluh delapan persen). Dengan menggunakan rumus perhitungan efisiensi, maka Efisiensi penggunaan Anggaran terhadap Output Kinerja yaitu sebesar 62% (enam puluh dua persen).

Efisiensi dari keseluruhan indikator kinerja adalah 40,97% (empat puluh koma sembilan tujuh persen). Hal ini didapat dengan menjumlahkan efisiensi masing-masing indikator kinerja dibagi dengan jumlah indikator.

Nilai Efisiensi yang diperoleh adalah sebesar 150,73% (seratus lima puluh koma tujuh tiga persen). Nilai Efisiensi didapat dengan menggunakan rumus :

E = Efisien

NE = Nilai Efisien

$$\begin{aligned} NE &= 50\% + (E/20 \times 50) \\ &= 50\% + (40,97\%/20 \times 50) \\ &= 50\% + 100,73\% \\ &= 150,73\% \end{aligned}$$

6. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2022 ada yang berhasil dan ada pula yang belum mencapai target kinerja. Keberhasilan dan kegagalan tersebut tentu harus dianalisa secara komprehensif, agar menjadi tolak ukur pada program dan kegiatan tahun berikutnya. Analisa terhadap program dan kegiatan yang berhasil maupun yang gagal terangkum dalam hasil berikut ini.

Indikator Kinerja : Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan

Realisasi kinerja pada Indikator kinerja Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan pada Tahun 2022 berhasil mencapai target kinerja, yaitu 100% (seratus persen), dengan persentase capaian 100% (seratus persen). Keberhasilan tersebut karena seluruh tunggakan perkara tahun 2021 sebanyak 18 (delapan belas) perkara telah diselesaikan pada tahun 2022.

Indikator Kinerja : Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Realisasi kinerja pada Indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu pada Tahun 2022 sebesar 77,55% (tujuh puluh tujuh koma lima lima), berhasil mencapai target kinerja yang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dengan tingkat capaian kinerja sebesar 103,4% (seratus tiga koma empat persen).

Keberhasilan tersebut karena telah dilakukan upaya-upaya peningkatan dalam penyelesaian selama rentang waktu 0-5 bulan, administrasi perkara yang telah putus sampai dengan minutasi (pengisian data minutasi di SIPP).

Indikator Kinerja : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding

Realisasi kinerja pada Indikator kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding pada Tahun 2022 adalah 57,14% (lima puluh tujuh koma satu empat persen), lebih tinggi dari target sebesar 40% (empat puluh persen) dengan capaian kinerja sebesar 142,85% (seratus sembilan puluh dua koma tiga satu persen).

Keberhasilan tersebut dapat disebabkan terdapat perkara dicabut dan/ atau tidak lolos dismissal, selain itu bisa juga karena putusan perkara tingkat pertama dapat diasumsikan telah memuaskan para pihak yang bersengketa. Namun juga karena terdapat perkara yang telah putus dan minutas diakhir tahun yang belum diajukan upaya hukum banding.

Indikator Kinerja : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Realisasi kinerja pada Indikator kinerja Persentase Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada Tahun 2022 sebesar 36,36% (tiga puluh enam koma tiga enam persen), dan berhasil melebihi target kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan capaian kinerja sebesar 145,44% (seratus empat puluh lima koma empat empat persen).

Keberhasilan tersebut dapat disebabkan terdapat perkara yang dimohonkan banding dicabut, atau putusan yang dapat diterima oleh para pihak, serta terdapat perkara banding yang telah putus dan belum diajukan upaya hukum kasasi.

Indikator Kinerja : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK

Realisasi kinerja pada Indikator kinerja Persentase Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) pada Tahun 2022 sebesar 88,24% (delapan puluh delapan koma dua empat persen), dan berhasil melampau target kinerja sebesar 60% (enam puluh persen), dengan capaian kinerja sebesar 147,07% (seratus empat puluh tujuh koma nol tujuh persen).

Keberhasilan tersebut dapat disebabkan terdapat perkara yang dimohonkan kasasi dicabut, putusan kasasi yang dapat diterima oleh para pihak, terdapat perkara yang kasasi belum diajukan upaya hukum peninjauan Kembali karena kurangnya bukti baru.

Indikator Kinerja : Index Responden Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan

Realisasi kinerja pada Indikator kinerja Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan pada Tahun 2022 sebesar 100% (seratus persen), berhasil melebihi target kinerja sebesar 80% (delapan puluh persen), dengan capaian kinerja sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen).

Keberhasilan tersebut terjadi karena terdapat upaya-upaya peningkatan pelayanan, peningkatan fasilitas, sarana dan prasarana di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Upaya-upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat terus digalakkan dengan pelatihan pelayanan prima, pelatihan pelayanan kaum disabilitas, dan pelatihan petugas pelayanan terhadap pemahakam tupoksi dan SOP, agar tingkat kepuasan masyarakat semakin tinggi.

Indikator Kinerja : Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

Realisasi kinerja pada Indikator kinerja Persentase Salinan Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu pada Tahun 2022 sebesar 71,43% (tujuh puluh satu koma empat tiga persen). Realisasi Kinerja tersebut berada di bawah target kinerja yakni sebesar 100% (seratus persen). Capaian kinerja yang telah diraih yaitu 71,43% (tujuh puluh satu koma empat tiga persen).

Kegagalan mencapai target kinerja tersebut terjadi karena setelah putusan, para pihak yang tidak mengajukan upaya hukum banding, belum membayar biaya PNBP sebagaimana ketentuan dalam pengambilan Salinan Putusan. Ketidapahaman para pihak kan hal tersebut, berpengaruh terhadap penyampaian Salinan Putusan kepada Para Pihak. Padahal dengan adanya e-Court dan tanda tangan elektronik, memudahkan para pihak mendapatkan salinan putusan resmi setelah pihak membayar PNBP.

Indikator Kinerja : Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

Realisasi kinerja pada Indikator kinerja Persentase Persentase berkas kenaikan perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu pada

Tahun 2022 sebesar 90,47%, (sembilan puluh koma empat tujuh persen), dan berhasil mencapai target kinerja sebesar 90% (sembilan puluh persen), dengan Capaian Kinerja sebesar 100,52% (serratus koma lima dua persen).

Keberhasilan tersebut tersebut karena berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, pk, telah lengkap dan dikirimkan sebelum batas waktu. Selain itu terdapat berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, pk, yang dimohonkan pada akhir tahun yang belum lengkap sehingga diajukan pada tahun berikutnya.

Indikator Kinerja : Persentase Putusan Perkara TUN Yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari setelah putus

Realisasi kinerja pada Indikator kinerja Persentase Putusan Perkara TUN Yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari setelah putus pada Tahun 2022 sebesar 75%, (tujuh puluh lima persen), dan berhasil jauh melewati target kinerja sebesar 5% (lima persen).

Hasil pengukuran ini menunjukkan peningkatan kinerja dalam upaya publikasi putusan yang menarik perhatian yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari. Dengan penerapan *One Day Publish* dan *One Day Minutering* terutama terhadap perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat, diharapkan mampu menjawab tantangan percepatan publikasi putusan kepada masyarakat.

Indikator Kinerja : Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Realisasi kinerja pada Indikator kinerja Persentase perkara prodeo yang diselesaikan pada Tahun 2021 sebesar 0% (nol persen), dan tidak berhasil mencapai target kinerja sebesar 100% sehingga Capaian Kinerjanya 0% (nol persen).

Kegagalan tersebut terjadi karena tidak terdapat perkara prodeo yang masuk dan diselesaikan pada tahun 2022. Tidak adanya perkara prodeo yang masuk hal itu dimungkinkan karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai layanan pos bantuan hukum di Pengadilan dan Layanan Pembebasan Biaya Perkara. Kurangnya sosialisasi mengenai perkara prodeo (pembebasan biaya perkara) kepada golongan tertentu yang tidak mampu, dapat menjadi salah satu penyebabnya. Pengurusan berkas SKTM mungkin juga menjadi kesulitan bagi masyarakat tidak mampu, dan jarak

dari lokasi masyarakat ke Pengadilan TUN Samarinda yang berada di ibukota Provinsi menyulitkan untuk mendapatkan perkara prodeo tersebut.

Indikator Kinerja : Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan Layanan bantuan hukum

Realisasi kinerja pada Indikator kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum pada Tahun 2022 yaitu 100% (seratus persen) dan mencapai target kinerja sebesar, yaitu 100% (seratus persen), sehingga Capaian Kinerjanya juga 100% (seratus persen).

Keberhasilan tersebut karena seluruh pencari keadilan golongan tertentu mendapatkan layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2022. Layanan yang diberikan dan diterima oleh pencari keadilan tersebut berupa pemberian konsultasi atau advis hukum, pembuatan dokumen hukum, dan informasi penyedia layanan bantuan hukum di pengadilan.

Indikator Kinerja : Persentase putusan perkara TUN yang ditindaklanjuti

Realisasi kinerja pada Indikator kinerja Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti pada Tahun 2022 sebesar 0% (nol persen) dan tidak mencapai target kinerja sebesar 5% (lima persen).

Belum optimalnya realisasi kinerja tersebut disebabkan karena Peradilan TUN tidak memiliki kekuatan untuk memaksa melaksanakan eksekusi (hanya bersifat pengawasan eksekusi), dan rendahnya kesadaran dari penyelenggara publik/instansi untuk melaporkan tindak lanjut putusan perkara TUN, serta dapat juga masih rendahnya tingkat kepatuhan dari penyelenggara publik/instansi untuk melaksanakan putusan perkara TUN.

Indikator Kinerja : Persentase putusan perkara TUN yang dimohonkan eksekusi

Realisasi kinerja pada Indikator kinerja Persentase Putusan Perkara TUN yang dimohonkan eksekusi pada Tahun 2022 sebesar 4% (empat persen) dan tidak mencapai target kinerja sebesar 20% (dua puluh persen), sehingga Capaian Kinerjanya hanya 36,35% (tiga puluh enam koma tiga lima persen).

Belum optimalnya realisasi kinerja tersebut disebabkan karena tidak semua perkara TUN bersifat eksekusi dan putusan yang telah BHT Berkekuatan Hukum Tetap) hanya sedikit yang mengajukan eksekusi, serta perkara yang dimohonkan eksekusi adalah perkara-perkara yang telah lama BHT pada tahun-tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja : Persentase penyerapan anggaran belanja pegawai, operasional, pemeliharaan dan belanja modal

Realisasi kinerja pada Indikator kinerja Persentase penyerapan anggaran belanja pegawai, operasional, pemeliharaan dan belanja modal pada Tahun 2022 sebesar 97,19% (sembilan puluh tujuh koma satu sembilan persen) dan melewati target kinerja sebesar 95% (sembilan puluh lima persen).

Keberhasilan tersebut disebabkan karena Target tersebut dapat dilampaui, karena dilakukan perubahan-perubahan struktur anggaran/ revisi anggaran terhadap pagu anggaran yang kurang terserap dan mengoptimalkan kepada belanja yang dapat terserap dengan mengacu pada ketentuan atau aturan perbendaharaan keuangan negara.

Indikator Kinerja : Persentase penyerapan anggaran manajemen peradilan militer dan tun

Realisasi kinerja pada Indikator kinerja Persentase penyerapan anggaran manajemen peradilan militer dan tun pada Tahun 2022 sebesar 88,11% (delapan puluh delapan koma satu satu persen) dan melewati target kinerja sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

Keberhasilan tersebut disebabkan karena penyerapan anggaran belanja jasa layanan posbakum yang terealisasi seluruhnya (100%), namun demikian masih terdapat belanja yang belum terealisasi seluruhnya seperti biaya pengamanan sidang, dan terdapat belanja yang sama sekali tidak terealisasi seperti biaya pembebasan biaya perkara (prodeo).

B. REALISASI ANGGARAN

1. Pagu Anggaran

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada Tahun Anggaran 2022 mengelola 2 (dua) DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), yaitu : DIPA 01 Badan Urusan Administasi Mahkamah Agung dan DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

- a. DIPA 01 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Nomor SP DIPA Nomor: SP DIPA-005.01.2.559857/2022 tanggal 17 November 2021 sebesar Rp.5.704.041.000,- (*Lima Miliar Tujuh Ratus Empat Juta Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*), setelah revisi Pagu Anggaran DIPA 01 bertambah menjadi Rp.6.200.893.000,- (*Enam Miliar Dua Ratus Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah*). Pagu Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda DIPA 01 BUA Mahkamah Agung Tahun 2022 beserta perubahan terakhir (revisi) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.41. Pagu DIPA 01 BUA Mahkamah Agung Tahun 2022

No.	Uraian	Pagu Semula (Rp)	Pagu Setelah Revisi (Rp)	Tambah/Kurang
1	Belanja Pegawai	3.854.947.000	4.351.799.000	496.852.000
2	Belanja Barang	1.749.534.000	1.784.094.000	34.560.000
3	Belanja Barang Non Operasional	5.000.000	5.000.000	0
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi)	10.000.000	10.000.000	0
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran)	20.000.000	20.000.000	0
6	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (Pengadaan Prasarana Disabilitas Pengadilan)	30.000.000	30.000.000	0
	Total	5.669.481.000	6.200.893.000	511.412.000

Pertambahan PAGU tersebut karena terdapat tambahan anggaran untuk belanja sewa rumah dinas sebesar Rp.34.560.000,- (*Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*) dan tambahan anggaran untuk kekurangan belanja

pegawai sebesar Rp.496.852.000,- (*Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah*).

- b. DIPA 05 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor SP DIPA Nomor : SP DIPA-005.05.2.559858./2022 tanggal 17 November 2021 sebesar Rp.36.500.000,- (*Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*), tanpa ada revisi atau penambahan pagu anggaran. Pagu Anggaran DIPA 05 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.42. Rincian Belanja DIPA 05 559858

No.	Uraian	Pagu (Rp)
2	Belanja Biaya Pengamanan Sidang	3.000.000
3	Belanja Biaya ATK Posbankum	4.100.000
4	Belanja Jasa Konsultan Hukum	28.800.000
5	Belanja Biaya Perkara Prodeo	600.000
	Total	36.600.000

2. Realisasi Anggaran

a) Realisasi Anggaran DIPA 01 BUA

Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun Anggaran 2022 Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.6.026.784.429,- (*Enam Miliar Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*) atau sebesar 97,19% (*Sembilan Puluh Tujuh Koma Sembilan Belas Persen*).

Adapun rincian realisasi sebagai berikut :

Tabel 3.43. Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2022

No.	Uraian	Pagu (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi	Sisa	%
1	Belanja Pegawai	3.854.947.000	4.351.799.000	4.239.508.137	112.290.863	97.42
2	Belanja Barang (Operasional)	1.749.534.000	1.784.094.000	1.723.247.680	60.846.320	96.59
3	Belanja Barang Non Operasional (Penanganan Pandemi Covid 19)	5.000.000	5.000.000	4.795.000	205.000	95.90
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Pengadaan Perangkat Data dan Komunikasi)	10.000.000	10.000.000	9.900.000	100.000	99.00
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran)	20.000.000	20.000.000	19.888.980	111.000	99.44
6	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (Pengadaan Prasarana Disabilitas Pengadilan)	30.000.000	30.000.000	29.444.632	555.368	98.15
	Total	5.669.481.000	6.200.893.000	6.026.784.429	174.108.571	97.19

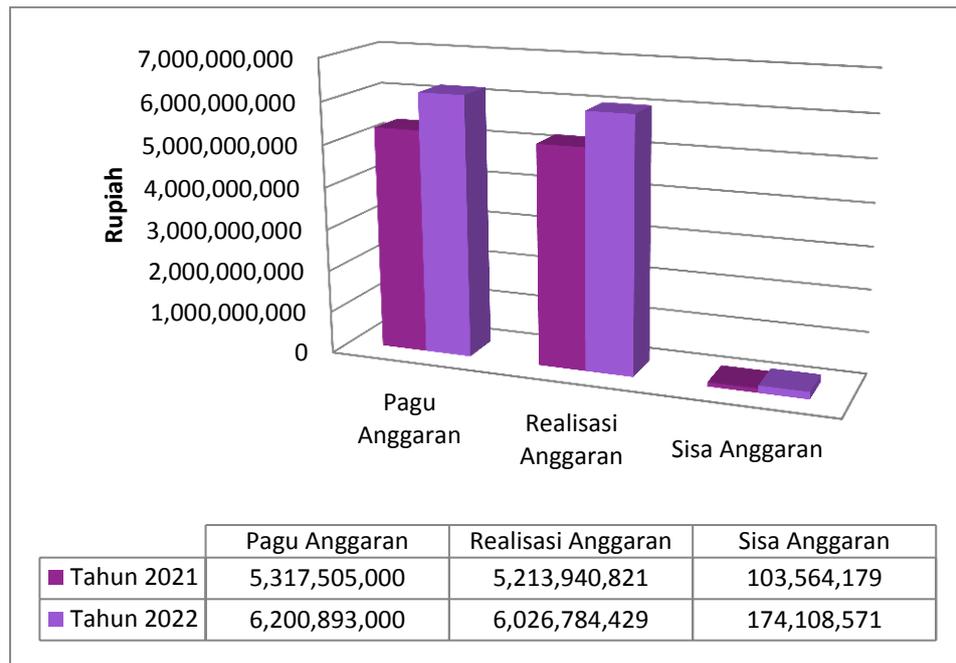
Realisasi Anggaran DIPA 01 BUA 559857 Tahun 2022 sebesar Rp.6.026.784.429,- (*Enam Miliar Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*) lebih tinggi dari Tahun 2021 yang mencapai Rp.5.213.940.821,- (*Lima Miliar Dua Ratus Tuga Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*), atau mengalami kenaikan sebesar Rp.812.843.608,- atau naik sebesar 13,49% (tiga belas koma empat sembilan persen).

Perbedaan tersebut karena terdapat perbedaan jumlah pagu anggaran Tahun 2022 dengan 2021, dimana pada Tahun 2022 pagu anggaran lebih besar dari pagu anggaran Tahun 2021.

Rincian perbandingan pagu dan realisasi anggaran tahun 2021 dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.44. Perbandingan Pelaksanaan Anggaran DIPA 01 Tahun 2021 dengan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Perbedaan Anggaran	Persentase Perbandingan (naik/turun)
Pagu Anggaran	5.317.505.000	6.200.893.000	883.388.000	14,25%
Realisasi Anggaran	5.213.940.821	6.026.784.429	812.843.608	13,49%
Sisa Anggaran	103.564.179	174.108.571	70.544.392	40,52%



Grafik 3.21. Perbandingan Pelaksanaan Anggaran DIPA 01 Tahun 2021 dan Tahun 2022

b) Realisasi Anggaran DIPA 05 Ditjenmiltun

Realisasi Anggaran DIPA 05 Tahun Anggaran 2022 Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 32.159.000,- (*Tiga Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) atau sebesar 88.11% (*Delapan Puluh Delapan Koma Sebelas Persen*).

Adapun rincian realisasi sebagai berikut :

Tabel 3.45. Realisasi Anggaran DIPA 05 Badilmiltun Tahun 2022

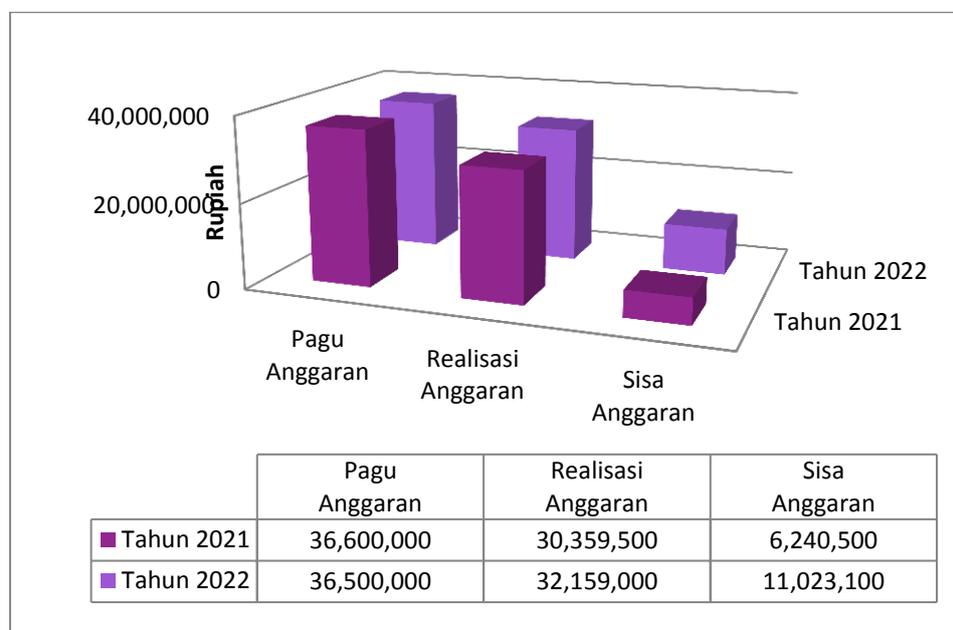
No.	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi	Sisa	%
1	Belanja Bahan (Konsumsi Pengamanan Sidang)	2.500.000	950.000	1.550.000	38.00
2	Belanja Barang Persediaan Konsumsi (ATK Posbakum)	4.200.000	2.409.000	1.791.000	57.36
3	Belanja Jasa Konsultasi (Honor Jasa Konsultasi Hukum)	28.800.000	28.800.000	800.000	100.00
4	Belanja Pengiriman Pemberitahuan / Panggilan	800.000	0	100.000	0
5	Belanja Bahan (Pengadaan dan Penjilidan Berkas Perkara)	100.000	0	100.000	0
	Total	36.500.000	32.159.000	4.341.000	88.11

Realisasi Anggaran DIPA 05 559858 Tahun 2022 adalah Rp.32.159.000,- (*Tiga Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) dengan persentase realisasi sebesar 88,1% (*delapan puluh delapan koma satu satu persen*). Realisasi Anggaran DIPA 05 Tahun 2022 lebih tinggi dari realisasi anggaran DIPA 05 Tahun 2021 yakni sebesar Rp.30.359.500,- (*Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah*), peningkatan realisasi sebesar Rp.1.799.500,- (*Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribui Lima Ratus Rupiah*) atau naik 5,60% (*lima koma enam nol persen*).

Rincian perbandingan pagu dan realisasi anggaran tahun 2021 dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.46. Perbandingan Pelaksanaan Anggaran DIPA 05 Tahun 2021 dengan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Perbedaan Anggaran	Persentase Perbandingan (naik/turun)
Pagu Anggaran	36.600.000	36.500.000	-100.000	-0,27%
Realisasi Anggaran	30.359.500	32.159.000	1.799.500	5,60%
Sisa Anggaran	6.240.500	11.023.100	4.782.600	43,39%



Grafik 3.22. Perbandingan Pelaksanaan Anggaran DIPA 05 Tahun 2021 dan Tahun 2022

Meningkatnya nilai realisasi anggaran DIPA 05 559858 pada Tahun 2022 disebabkan telah dilakukan optimalisasi anggaran belanja namun kenaikan tersebut tidaklah signifikan, karena masih terdapat belanja yang penyerapannya belum optimal seperti belanja pengamanan sidang dan belanja atk posbakum, serta belanja biaya perkara prodeo yang tidak ada penyerapan anggarannya karena ketiadaan perkara prodeo.

3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berasal dari PNBP 01 Badan Urusan Administrasi yang bersumber dari pengelolaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) dan PNBP 05 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara yang bersumber dari Tupoksi Peradilan.

a) Realisasi PNBP 01 BUA

Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP DIPA 01 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda per 31 Desember 2022 sebesar Rp.10.840.000,- (*Sepuluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*). Rincian realisasi PNBP tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.47. PNBP 01 BUA Tahun 2022

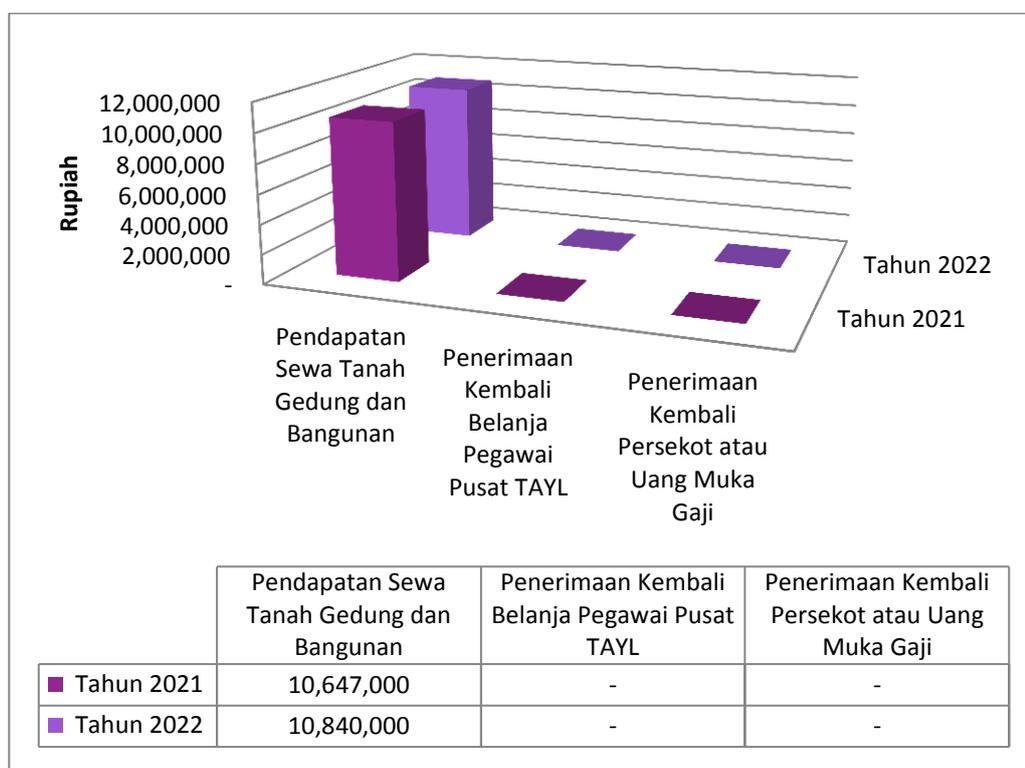
Uraian Jenis PNBP	Jumlah Penerimaan
Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	10.840.000
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	-
Penerimaan Kembali Persekot atau Uang Muka Gaji	-
Jumlah Penerimaan	10.840.000

Realisasi PNBP 01 BUA Tahun 2022 sebesar Rp.10.840.000,- (*Sepuluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*), meningkat 1,81% (satu koma delapan satu persen) yaitu sebesar Rp.193.000,- (*Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah*) dibandingkan dengan PNBP 01 BUA Tahun 2021 yang sebesar Rp.10.647.000,- (*Sepuluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah*). Perbandingan realiasi PNBP tersebut dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.48. Perbandingan Realisasi PNBP 01 BUA Tahun 2021 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Perbandingan Naik / Turun	Persentase Perbandingan (%)
Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	10.647.000	10.840.000	193.000	1,81%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	-	-	-	0,00%
Penerimaan Kembali Persekot atau Uang Muka Gaji	-	-	-	0,00%
Total	10.647.000	10.840.000	193.000	1,81%

Grafik perbandingan realisasi PNBP 01 BUA Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2021 dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :



Grafik 3.23. Perbandingan Perbandingan PNBP 01 BUA Tahun 2021 dan Tahun 2022

Dari tabel dan grafik perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Peningkatan tersebut terjadi karena tingkat keterisian rumah dinas yang meningkat (8 (delapan) unit rumah dinas terisi semuanya) sehingga meningkatkan PNBP dari biaya sewa rumah negara/dinas.

Realisasi PNBP 05 Ditjenmiltun

Realisasi PNBP 05 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2022 per 31 Desember 2022 sebesar Rp.28.208.400,- (*Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah*). Rincian realisasi PNBP tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.49. PNBP 05 Badilmiltun Tahun 2020

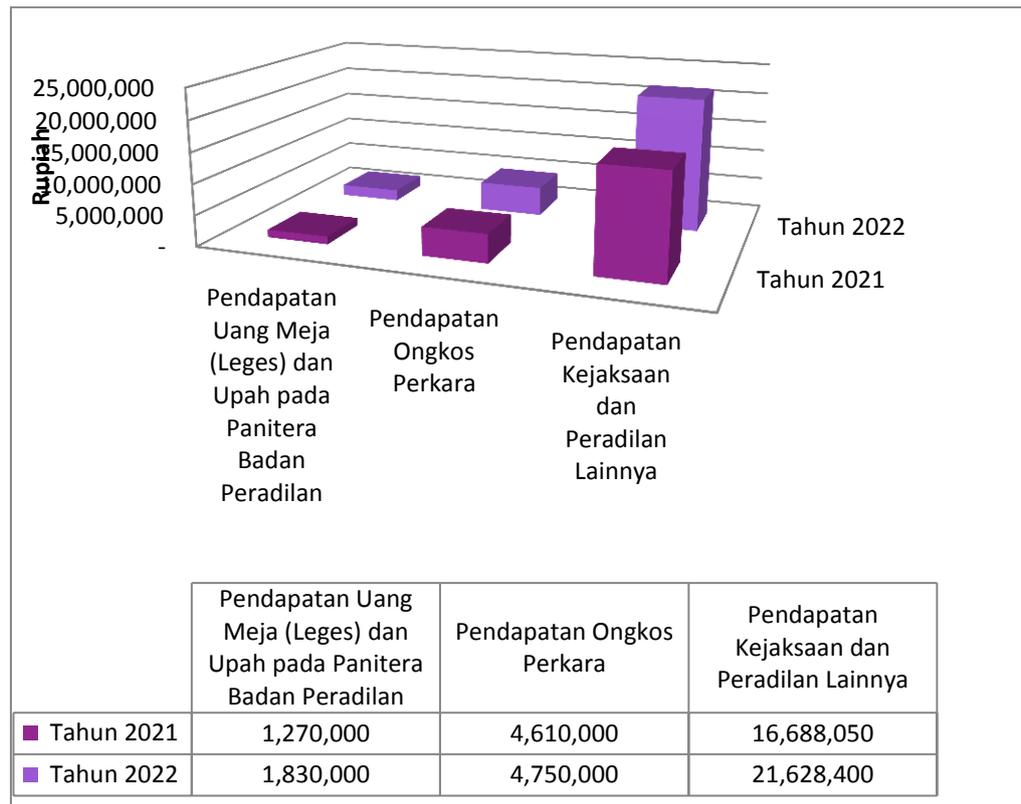
Uraian Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Jumlah Penerimaan
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	1.830.000
Pendapatan Ongkos Perkara	4.750.000
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	21.628.400
Jumlah Penerimaan	28.208.400

Realisasi PNBP 05 Ditjenmiltun Tahun 2022 sebesar Rp.28.208.400,- (*Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah*), naik sebesar 20% (dua puluh persen) atau sebesar Rp.5.640.350,- (*Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah*) dibandingkan PNBP 05 Ditjenmiltun Tahun 2021 sebesar Rp.22.568.050,- (*Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Rupiah*).

Perbandingan realiasi PNBP tersebut dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 3.50. Perbandingan Realisasi PNBP 05 Badilmiltun Tahun 2021 dan Tahun 2022

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Perbandingan Naik / Turun	Persentase Perbandingan (%)
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	1.270.000	1.830.000	560.000	30,60%
Pendapatan Ongkos Perkara	4.610.000	4.750.000	140.000	2,95%
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	16.688.050	21.628.400	4.940.350	22,84%
Total	22.568.050	28.208.400	5.640.350	20,00%



Grafik 3.24. Perbandingan Realisasi PNBP 05 Ditjenmiltun Tahun 2021 dan Tahun 2022

Dari tabel dan grafik perbandingan Realisasi PNBP 05 Ditjen Badilmiltun Tahun 2021 dan Tahun 2020, bahwa terdapat peningkatan nilai PNBP pada setiap uraian pendapatan. Sementara jumlah perkara yang ditangani pada Tahun 2022 yaitu 64 (empat puluh empat) perkara, sama dengan jumlah perkara yang ditangani pada tahun 2021 yaitu 64 (empat puluh empat) perkara.

BAB IV – PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah laporan hasil pengukuran kinerja yang dilaksanakan oleh instansi dalam kurun waktu satu tahun. LKjIP Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2022 adalah Laporan Hasil Realisasi dan Capaian Kinerja Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) selama Tahun 2022.

Dari hasil realisasi dan capaian kinerja pada Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa Persentase Rata-Rata Realisasi Kinerja Tahun 2022 yaitu 65,92% (enam puluh lima koma sembilan dua persen) lebih tinggi dari Rata-Rata Target Kinerja yaitu 64,67% (enam puluh empat koma enam tujuh persen), dengan Capaian Kinerja Tahun 2022 adalah 185,12% (seratus delapan puluh lima koma satu dua persen).

Indikator Kinerja yang mengalami kenaikan realisasi dan capaian kinerja adalah :

1. Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu satu hari setelah putus.
2. Persentase Putusan Perkara TUN yang Dimohonkan Eksekusi.
3. Persentase Penyerapan Anggaran Manajemen Peradilan Militer dan TUN.

Indikator Kinerja yang mengalami penurunan realisasi dan capaian kinerja adalah :

1. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu.
2. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.
3. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.
4. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK.
5. Persentase Salinan Putusan Yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu.
6. Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu.
7. Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Pegawai, Operasional dan Pemeliharaan, dan Belanja Modal.

Indikator Kinerja yang tidak mengalami perubahan realisasi dan capaian kinerja adalah :

1. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan.
2. Persentase Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan.
3. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan.
4. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).
5. Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Di Eksekusi).

Indikator Kinerja yang realisasi dan capaian kinerja masih 0% (nol persen) adalah :

1. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan.
2. Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Di Eksekusi).

Realisasi dan Capaian Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2022 dirasa masih belum optimal dan masih dapat ditingkatkan. Penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja dapat dipengaruhi beberapa faktor, seperti peraturan/regulasi, kebijakan, sumber daya aparatur yang handal, lingkungan kerja yang kondusif, kepuasan masyarakat, dukungan anggaran yang memadai dan lain sebagainya.

Untuk itu, harus terus dilakukan Reviu terhadap Indikator kinerja Utama (IKU), Reviu Rencana Strategis, serta selalu melakukan monitoring dan evaluasi kinerja setiap bulan, triwulan, semester, maupun tahunan, agar target kinerja dapat tercapai atau bahkan melampaui target kinerja.

B. LANGKAH-LANGKAH MASA MENDATANG

Untuk meningkatkan realisasi kinerja dan capaian kinerja ada beberapa langkah yang dapat dilaksanakan, yaitu :

1. Meningkatkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik;
2. LKjIP sebagai laporan realisasi dan capaian kinerja hendaknya disusun dengan sistematis, jelas, akuntabel, dan dapat dipertanggung jawabkan;
3. Melakukan Reviu IKU secara berkala, dan jika diperlukan untuk menambah IKU yang sesuai dengan prinsip SMART;

4. Melakukan Reviu Rencana Strategis Lima Tahunan secara berkala untuk melihat kesesuaian antara perencanaan dan pencapaian kinerja;
5. Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan disusun dengan mengevaluasi hasil realiasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya.
6. Mengikuti Diklat/Bimtek mengenai Penyusunan Dokumen SAKIP;

C. PENUTUP

Data yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun 2021 sudah dilakukan verifikasi data, baik dari laporan perkara dan Aplikasi SIPP pada Kepaniteraan, maupun laporan pada masing-masing sub bagian pada Kesekretariatan, sebagai filter dalam membuat dan menyusun laporan yang jelas, akurat, akuntabel, terpercaya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Semoga laporan kinerja yang kami susun bisa membantu akuntabilitas dan transparansi kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, diharapkan juga dapat menjadi tolak ukur dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kinerja untuk mewujudkan Pengadilan Modern yang Bebas dari Korupsi dan Bersih Melayani berbasis Teknologi Informasi, sebagaimana visi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yaitu “Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Yang Agung”.

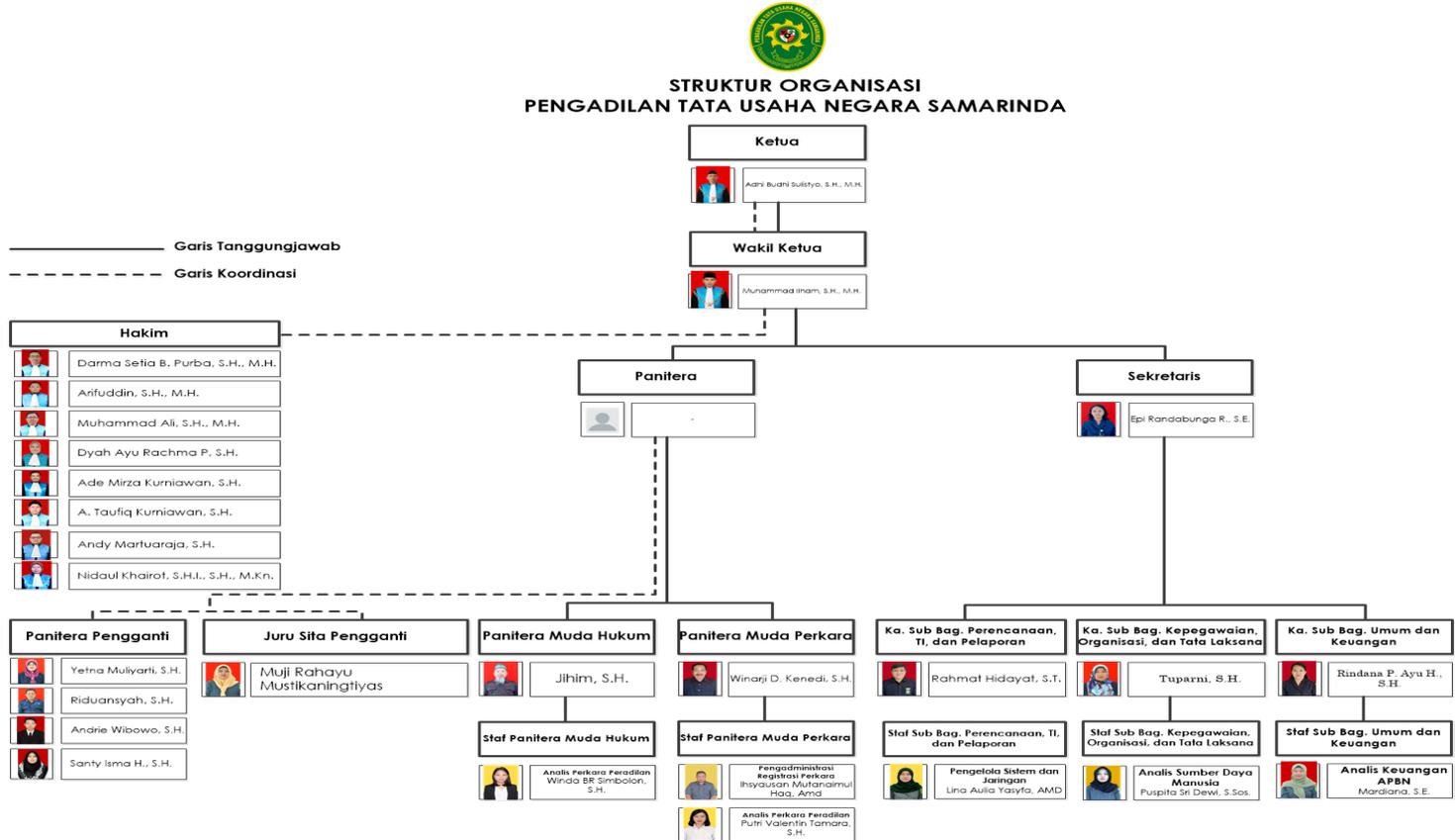


LAMPIRAN -LAMPIRAN

Laporan Kinerja Pengadilan Tatan Usaha Negara Samarinda



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
TAHUN 2022



*Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

JL. BUNG TOMO NO. 136 SAMARINDA SEBERANG TELP./FAX : (0541)262062/260659
SAMARINDA - KALIMANTAN TIMUR 75132

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA Nomor : W2-TUN5/167/OT.01.3/II/2021

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dipandang perlu untuk melakukan Reviu IKU secara periodik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2008 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara RI Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan Keputusan ini
- Memperhatikan : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
- PERTAMA : Review Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk menetapkan Reviu Rencana Strategis 2020-2024, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP).
- KEDUA : Review Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur pencapaian kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk merancang, mengukur, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 1 Februari 2021

KETUA, 

EDI FIRMANSYAH, S.H., M.H.
NIP. 196709101995031001

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara TUN yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara TUN yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara TUN yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara TUN adalah perkara TUN yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara TUN tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara TUN yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara TUN yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara TUN yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara TUN yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum Kasasi. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali}}{\text{Jumlah Perkara yang Telah Diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	$\frac{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan}}{\text{Jumlah Responden Pencari Keadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 	Panitera / Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara TUN yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara TUN yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara TUN yang Diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

8.		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tepat waktu untuk permohonan banding 60 (enam puluh) hari, Kasasi 65 (enam puluh lima) dan PK 74 (tujuh puluh empat) hari sesuai dengan buku II TUN Pedoman Teknis administrasi dan Teknis Peradilan TUN 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
9.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
10.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
11.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
12.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara TUN yang sudah BHT}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah diesksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan. 		
13.		Persentase Putusan Perkara TUN yang Dimohonkan Eksekusi	<p style="text-align: center;">Jumlah Putusan Perkara TUN yang Dimohonkan Eksekusi $\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara TUN yang Dimohonkan Eksekusi}}{\text{Jumlah Putusan Perkara TUN yang sudah BHT}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Adalah persentase permohonan eksekusi terhadap perkara yang telah BHT. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
14.	Meningkatnya transparansi pengelolaan keuangan dan aset	Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Pegawai, Operasional dan Pemeliharaan, dan Belanja Modal	<p style="text-align: center;">Realisasi Anggaran DIPA 01 $\frac{\text{Realisasi Anggaran DIPA 01}}{\text{Jumlah PAGU Anggaran DIPA 01}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Adalah persentase realisasi terhadap pagu anggaran DIPA 01 559857 	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
15.		Persentase Penyerapan Anggaran Manajemen Peradilan Militer dan TUN	<p style="text-align: center;">Realisasi Anggaran DIPA 05 $\frac{\text{Realisasi Anggaran DIPA 05}}{\text{Jumlah PAGU Anggaran DIPA 05}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Adalah persentase realisasi terhadap pagu anggaran DIPA 05 559858 	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ditetapkan : Samarinda
Pada tanggal : 1 Februari 2021



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua PTUN Samarinda/Hakim Madya Utama
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : SULISTYO, S.H., M.Hum.
Jabatan : Ketua PTTUN Jakarta/Hakim Utama Madya
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 17 Januari 2022

Pihak Kedua
Ketua PTTUN Jakarta

SULISTYO, S.H., M.Hum.
NIP. 19550815 198403 1 001

Pihak Pertama
Ketua PTUN Samarinda

ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.
NIP. 19710611 199203 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	75%
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	40%
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	25%
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	60%
	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara TUN yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	90%
	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu satu hari setelah putus	5%
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
	Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti	5%
	Persentase Putusan Perkara TUN yang Dimohonkan Eksekusi	20%
Meningkatnya transparansi pengelolaan keuangan dan aset	Persentase penyerapan anggaran belanja pegawai, operasional dan pemeliharaan, dan belanja modal	95%
	Persentase penyerapan anggaran manajemen Peradilan Militer dan TUN	75%

Kegiatan

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Adminitrasi	Rp.	Anggaran	5.609.481.000,-
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.		60.000.000,-
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp.		36.500.000,-

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Ketua,

SULISTYO, S.H., M.Hum.
NIP. 195508151984031001

Samarinda, 7 Februari 2022
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
Ketua,



ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.
NIP. 19710611192031004

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2022

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	75 %
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	40 %
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	25 %
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum PK	60 %
	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80 %
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perkara TUN yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100 %
	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	90 %
	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu Satu Hari Setelah Putus	5 %
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti	5 %
	Persentase Putusan Perkara TUN yang Dimohonkan Eksekusi	20 %
Meningkatnya transparansi pengelolaan keuangan dan aset	Persentase Penyerapan Anggaran Belanja Pegawai, Operasional dan Pemeliharaan, dan Belanja Modal	95 %
	Persentase Penyerapan Anggaran Manajemen Peradilan Militer dan TUN	75 %

Samarinda, 7 Februari 2022
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
Ketua,



ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.
NIP. 19710611 19203 1 004



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

Jl. Bung Tomo No. 136 Samarinda Kalimantan Timur

Telp (0541) 262062, Fax (0541) 260659 Kodepos 75132

SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

Nomor : W6-TUN3/ 314/ OT.01.2/ II/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN 2023

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
 - b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;
- Mengingat :
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) 2023 PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA;
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2023 Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.;
- KETIGA : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Maret Tahun 2023;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMARINDA
Pada Tanggal : 10 Februari 2023



ELIZABETH L.E.H.L. TOBING.S.H.M.Hum
NIP. 197607052000032002

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
 NOMOR : W6-TUN3/317 / OT.01.2/ II /2023
 Tanggal : 10 Februari 2023

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP)
 TAHUN 2023
 PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA

NO	JABATAN	NAMA
1.	Penanggung Jawab	Elizabeth I.E.H.L Tobing,S.H.,M.Hum (Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda)
2.	Koordinator Validasi Data	a. Dyah Ayu Rachma Permatasari, S.H (Hakim Pengawas Bidang Bagian Perkara) b. Andhy Martuaraja,S.H (Hakim Pengawas Bidang Bagian Perkara) c. Nidaul Khairat,S.H.I.,S.H.,M.Kn (Hakim Pengawas Bidang Bagian Hukum)
3.	Ketua	Taufiq,S.H (Panitera)
4.	Sekretaris	Epi Randabunga Runggu,S.E (Sekretaris)
5.	Anggota	1. Winarji Dian Kenedi,S.H. (Panitera Muda Perkara) 2. Jihim,S.H (Panitera Muda Hukum) 3. Rahmat Hidayat,S.T (Kepala Sub Bagian PTIP) 4. Rindana Puspa Ayu Hutabarat,S.H. (Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan) 5. Tuparni,S.H (Kepala Sub Bagian Kepegawaian,Organisasi dan Tata Laksana) 6. Lina Aulia Yasyfa,A.Md (Pengelola Sistem dan Jaringan)
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Penanggung Jawab : Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Ketua : Panitera Sekretaris : Sekretaris Anggota : a. Panitera Muda Perkara b. Panitera Muda Hukum c. Kepala Sub Bagian PTIP d. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan e. Kepala Sub Bagian Kepegawaian,

	Organisasi dan Tata Laksana f. Pengelola Sistem dan Jaringan
--	---



ELIZABETH L. E. H. I. TOBING.S.H.M.Hum
NIP. 197607052000032002

**DATA SISA PERKARA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA TAHUN 2021
YANG HARUS DISELESAIKAN PADA TAHUN 2022
SEMESTER I 2022**

No	Nomor Perkara	Tanggal Pendaftaran	Klasifikasi	Status Perkara	Tanggal Putus	Lama Proses
1	48/G/TF/2021/PTUN.SMD	30-Dec-21	Lain-Lain	Minutasi	21-Apr-22	34
2	46/G/2021/PTUN.SMD	16-Dec-21	Pertanahan	Minutasi	16-Jun-22	48
3	45/G/2021/PTUN.SMD	09-Dec-21	Lain-Lain	Minutasi	19-May-22	55
4	44/G/2021/PTUN.SMD	17-Nov-21	Lain-Lain	Minutasi	20-Jan-22	64
5	42/G/2021/PTUN.SMD	08-Nov-21	Pertanahan	Minutasi	30-Mar-22	86
6	41/G/2021/PTUN.SMD	04-Nov-21	Lain-Lain	Minutasi	25-Apr-22	90
7	40/G/2021/PTUN.SMD	04-Nov-21	Pertanahan	Minutasi	14-Apr-22	90
8	39/G/2021/PTUN.SMD	03-Nov-21	Pertanahan	Minutasi	21-Apr-22	91
9	37/G/2021/PTUN.SMD	21-Oct-21	Lain-Lain	Minutasi	24-Feb-22	104
10	36/G/2021/PTUN.SMD	21-Oct-21	Lain-Lain	Minutasi	24-Feb-22	104
11	35/G/2021/PTUN.SMD	21-Oct-21	Lain-Lain	Minutasi	24-Feb-22	104
12	34/G/2021/PTUN.SMD	18-Oct-21	Kepegawaian	Minutasi	26-Jan-22	100
13	32/G/TF/2021/PTUN.SMD	29-Sep-21	Lain-Lain	Minutasi	17-Feb-22	126
14	30/G/2021/PTUN.SMD	22-Sep-21	Pertanahan	Minutasi	15-Mar-22	133
15	29/G/2021/PTUN.SMD	17-Sep-21	Pertanahan	Minutasi	18-Jan-22	123
16	28/G/2021/PTUN.SMD	16-Sep-21	Pertanahan	Minutasi	26-Jan-22	132
17	27/G/TF/2021/PTUN.SMD	06-Sep-21	Pertanahan	Minutasi	13-Jan-22	129
18	24/G/2021/PTUN.SMD	14-Jul-21	Lain-Lain	Minutasi	11-Jan-22	181

**DATA PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
TAHUN 2022**

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Tahapan	Tanggal Putus	Lama Proses	Keterangan
1	24/G/2021/PTUN.SMD	14-Jul-21	Lain-Lain	Putusan	11-Jan-22	180	Tidak Tepat Waktu
2	27/G/TF/2021/PTUN.SMD	06-Sep-21	Pertanahan	Putusan	13-Jan-22	125	Tepat Waktu
3	28/G/2021/PTUN.SMD	16-Sep-21	Pertanahan	Putusan	26-Jan-22	130	Tepat Waktu
4	29/G/2021/PTUN.SMD	17-Sep-21	Pertanahan	Putusan	18-Jan-22	122	Tepat Waktu
5	34/G/2021/PTUN.SMD	18-Oct-21	Kepegawaian	Putusan	26-Jan-22	98	Tepat Waktu
6	44/G/2021/PTUN.SMD	17-Nov-21	Lain-Lain	Putusan	20-Jan-22	64	Tepat Waktu
7	37/G/2021/PTUN.SMD	21-Oct-21	Lain-Lain	Putusan	24-Feb-22	126	Tepat Waktu
8	36/G/2021/PTUN.SMD	21-Oct-21	Lain-Lain	Putusan	24-Feb-22	126	Tepat Waktu
9	35/G/2021/PTUN.SMD	21-Oct-21	Lain-Lain	Putusan	24-Feb-22	126	Tepat Waktu
10	32/G/TF/2021/PTUN.SMD	29-Sep-21	Lain-Lain	Putusan	17-Feb-22	141	Tepat Waktu
11	1/G/2022/PTUN.SMD	04-Jan-22	Pertanahan	Putusan	17-Mar-22	73	Tepat Waktu
12	42/G/2021/PTUN.SMD	08-Nov-21	Pertanahan	Putusan	30-Mar-22	142	Tepat Waktu
13	30/G/2021/PTUN.SMD	22 Sep. 2021	Pertanahan	Putusan	15-Mar-22	175	Tidak Tepat Waktu
14	39/G/2021/PTUN.SMD	03-Nov-21	Pertanahan	Putusan	21-Apr-22	170	Tidak Tepat Waktu
15	40/G/2021/PTUN.SMD	04-Nov-21	Pertanahan	Putusan	13-Apr-22	161	Tidak Tepat Waktu
16	41/G/2021/PTUN.SMD	04-Nov-21	Lain-lain	Putusan	25-Apr-22	173	Tidak Tepat Waktu

17	48/G/TF/2021/PTUN.SMD	30-Dec-21	Lain-lain	Putusan	21-Apr-22	113	Tepat Waktu
18	7/G/2022/PTUN.SMD	08-Mar-22	Kepegawaian	Putusan	28-Apr-22	52	Tepat Waktu
19	15/G/2022/PTUN.SMD	22-Mar-22	Pertanahan	Putusan	28-Apr-22	38	Tepat Waktu
20	2/G/KI/2022/PTUN.SMD	11-Jan-22	Keterbukaan Informasi Publik	Putusan	5-Apr-22	85	Tepat Waktu
21	8/G/2022/PTUN.SMD	08-Mar-22	Pertanahan	Putusan	10-May-22	64	Tepat Waktu
22	45/G/2021/PTUN.SMD	19-Dec-21	Lain-Lain	Putusan	19-May-22	162	Tidak Tepat Waktu
23	3/G/2022/PTUN.SMD	04-Feb-22	Kepegawaian	Putusan	19-May-22	105	Tepat Waktu
24	46/G/2021/PTUN.SMD	16-Dec-21	Pertanahan	Putusan	16-Jun-22	183	Tidak Tepat Waktu
25	4/G/2022/PTUN.SMD	17-Feb-22	Pertanahan	Putusan	23-Jun-22	127	Tepat Waktu
26	10/G/2022/PTUN.SMD	11-Mar-22	Perijinan	Putusan	27-Jun-22	109	Tepat Waktu
27	5/G/2022/PTUN.SMD	17-Feb-22	Lain-lain	Putusan	29-Jun-22	133	Tepat Waktu
28	12/G/2022/PTUN.SMD	15-Mar-22	Pertanahan	Putusan	26-Jul-22	134	Tepat Waktu
29	16/G/2022/PTUN.SMD	28-Mar-22	Lain-lain	Putusan	27-Jul-22	122	Tepat Waktu
30	25/G/TF/2022/PTUN.SMD	19-Jul-21	Tindakan Administrasi Pemerintah/Tindakan Faktual	Putusan	3-Aug-22	16	Tepat Waktu
31	26/G/TF/2022/PTUN.SMD	19-Jul-22	Tindakan Administrasi Pemerintah/Tindakan Faktual	Putusan	3-Aug-22	16	Tepat Waktu
32	13/G/2022/PTUN.SMD	17-Mar-22	Kepegawaian	Putusan	4-Aug-22	141	Tepat Waktu
33	14/G/2022/PTUN.SMD	18-Mar-22	Kepegawaian	Putusan	4-Aug-22	140	Tepat Waktu
34	9/G/TF/2022/PTUN.SMD	10-Mar-22	Lain-lain	Putusan	9-Aug-22	153	Tidak Tepat Waktu
35	23/G/2022/PTUN.SMD	11-Jul-22	Pertanahan	Putusan	18-Aug-22	39	Tepat Waktu
36	17/G/2022/PTUN.SMD	08-Apr-22	Lain-lain	Putusan	22-Aug-22	137	Tepat Waktu
37	18/G/2022/PTUN.SMD	19-Apr-22	Lain-lain	Putusan	7-Sep-22	142	Tepat Waktu
38	27/G/2022/PTUN.SMD	02-Aug-22	Pertanahan	Putusan	15-Sep-22	45	Tepat Waktu

39	11/G/2022/PTUN.SMD	14-Mar-22	Pertanahan	Putusan	20-Sep-22	191	Tidak Tepat Waktu
40	6/G/2022/PTUN.SMD	21-Feb-22	Pertanahan	Putusan	21-Sep-22	213	Tidak Tepat Waktu
41	20/G/2022/PTUN.SMD	20-Jun-22	Pertanahan	Putusan	18-Oct-22	121	Tepat Waktu
42	33/G/2022/PTUN.SMD	30-Aug-22	Lelang	Putusan	19-Oct-22	51	Tepat Waktu
43	19/G/LH/2022/PTUN.SMD	25-May-22	Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan	Putusan	16-Nov-22	176	Tidak Tepat Waktu
44	24/G/2022/PTUN.SMD	14-Jul-22	Pertanahan	Putusan	30-Nov-22	140	Tepat Waktu
45	35/G/TF/2022/PTUN.SMD	28-Sep-22	Tindakan Administrasi Pemerintahan / Tindakan Faktual	Putusan	15-Nov-22	49	Tepat Waktu
46	36/G/2022/PTUN.SMD	13-Oct-22	Pertanahan	Putusan	7-Nov-22	26	Tepat Waktu
47	22/G/2022/PTUN.SMD	11-Jul-22	Pertanahan	Putusan	1-Dec-22	144	Tepat Waktu
48	30/G/2022/PTUN.SMD	22-Aug-22	Lelang	Putusan	20-Dec-22	121	Tepat Waktu
49	29/G/2022/PTUN.SMD	19-Aug-22	Lelang	Putusan	27-Dec-22	131	Tepat Waktu

**DATA PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
TAHUN 2022**

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Tahapan
1	24/G/2021/PTUN.SMD	14-Jul-21	Lain-Lain	Banding
2	27/G/TF/2021/PTUN.SMD	06-Sep-21	Pertanahan	Banding
3	28/G/2021/PTUN.SMD	16-Sep-21	Pertanahan	Putusan
4	29/G/2021/PTUN.SMD	17-Sep-21	Pertanahan	Banding
5	34/G/2021/PTUN.SMD	18-Oct-21	Kepegawaian	Banding
6	44/G/2021/PTUN.SMD	17-Nov-21	Lain-Lain	Putusan
7	37/G/2021/PTUN.SMD	21-Oct-21	Lain-Lain	Putusan
8	36/G/2021/PTUN.SMD	21-Oct-21	Lain-Lain	Putusan
9	35/G/2021/PTUN.SMD	21-Oct-21	Lain-Lain	Putusan
10	32/G/TF/2021/PTUN.SMD	29-Sep-21	Lain-Lain	Banding
11	1/G/2022/PTUN.SMD	04-Jan-22	Pertanahan	Putusan
12	42/G/2021/PTUN.SMD	08-Nov-21	Pertanahan	Banding
13	30/G/2021/PTUN.SMD	22 Sep. 2021	Pertanahan	Putusan
14	39/G/2021/PTUN.SMD	03-Nov-21	Pertanahan	Putusan
15	40/G/2021/PTUN.SMD	04-Nov-21	Pertanahan	Banding
16	41/G/2021/PTUN.SMD	04-Nov-21	Lain-lain	Banding
17	48/G/TF/2021/PTUN.SMD	30-Dec-21	Lain-lain	Banding
18	7/G/2022/PTUN.SMD	08-Mar-22	Kepegawaian	Putusan
19	15/G/2022/PTUN.SMD	22-Mar-22	Pertanahan	Putusan
20	2/G/KI/2022/PTUN.SMD	11-Jan-22	Keterbukaan Informasi Publik	Putusan
21	8/G/2022/PTUN.SMD	08-Mar-22	Pertanahan	Putusan
22	45/G/2021/PTUN.SMD	19-Dec-21	Lain-Lain	Banding
23	3/G/2022/PTUN.SMD	04-Feb-22	Kepegawaian	Putusan

24	46/G/2021/PTUN.SMD	16-Dec-21	Pertanahan	Banding
25	4/G/2022/PTUN.SMD	17-Feb-22	Pertanahan	Banding
26	10/G/2022/PTUN.SMD	11-Mar-22	Perijinan	Putusan
27	5/G/2022/PTUN.SMD	17-Feb-22	Lain-lain	Putusan
28	12/G/2022/PTUN.SMD	15-Mar-22	Pertanahan	Banding
29	16/G/2022/PTUN.SMD	28-Mar-22	Lain-lain	Banding
30	25/G/TF/2022/PTUN.SMD	19-Jul-21	Tindakan Administrasi Pemerintah/Tindakan Faktual	Putusan
31	26/G/TF/2022/PTUN.SMD	19-Jul-22	Tindakan Administrasi Pemerintah/Tindakan Faktual	Putusan
32	13/G/2022/PTUN.SMD	17-Mar-22	Kepegawaian	Banding
33	14/G/2022/PTUN.SMD	18-Mar-22	Kepegawaian	Banding
34	9/G/TF/2022/PTUN.SMD	10-Mar-22	Lain-lain	Putusan
35	23/G/2022/PTUN.SMD	11-Jul-22	Pertanahan	Putusan
36	17/G/2022/PTUN.SMD	08-Apr-22	Lain-lain	Putusan
37	18/G/2022/PTUN.SMD	19-Apr-22	Lain-lain	Putusan
38	27/G/2022/PTUN.SMD	02-Aug-22	Pertanahan	Putusan
39	11/G/2022/PTUN.SMD	14-Mar-22	Pertanahan	Banding
40	6/G/2022/PTUN.SMD	21-Feb-22	Pertanahan	Banding
41	20/G/2022/PTUN.SMD	20-Jun-22	Pertanahan	Banding
42	33/G/2022/PTUN.SMD	30-Aug-22	Lelang	Putusan
43	19/G/LH/2022/PTUN.SMD	25-May-22	Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan	Banding
44	24/G/2022/PTUN.SMD	14-Jul-22	Pertanahan	Putusan
45	35/G/TF/2022/PTUN.SMD	28-Sep-22	Tindakan Administrasi Pemerintahan / Tindakan Faktual	Putusan
46	36/G/2022/PTUN.SMD	13-Oct-22	Pertanahan	Putusan
47	22/G/2022/PTUN.SMD	11-Jul-22	Pertanahan	Banding
48	30/G/2022/PTUN.SMD	22-Aug-22	Lelang	Putusan
49	29/G/2022/PTUN.SMD	19-Aug-22	Lelang	Putusan

**DATA PERKARA BANDING YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
TAHUN 2022**

No	Nomor Perkara	Tanggal Putus Perkara Banding	Klasifikasi Perkara	Tahapan
1	17/G/2021/PTUN.SMD	04-Jan-22	Pertanahan	Kasasi
2	18/G/2021/PTUN.SMD	05-Jan-22	Lain-Lain	Kasasi
3	21/G/2021/PTUN.SMD	22-Feb-22	Pertanahan	Kasasi
4	25/G/2021/PTUN.SMD	29-Mar-22	Pertanahan	Kasasi
5	27/G/TF/2021/PTUN.SMD	17-Mar-22	Pertanahan	Kasasi
6	24/G/2021/PTUN.SMD	08-Apr-22	Lain-lain	Banding
7	29/G/2021/PTUN.SMD	12-Apr-22	Pertanahan	Banding
8	32/G/TF/2021/PTUN.SMD	20-May-22	Pertanahan	Banding
9	42/G/2021/PTUN.SMD	13-Jun-22	Pertanahan	Kasasi
10	48/G/TF/2021/PTUN.SMD	15-Jun-22	Lain-lain	Kasasi
11	40/G/2021/PTUN.SMD	12-Aug-22	Pertanahan	Kasasi
12	41/G/2021/PTUN.SMD	24-Aug-22	Lain-Lain	Kasasi
13	4/G/2022/PTUN.SMD	13-Sep-22	Pertanahan	Kasasi
14	45/G/2021/PTUN.SMD	19-Sep-22	Lain-lain	Kasasi
15	46/G/2021/PTUN.SMD	22-Sep-22	Pertanahan	Banding
16	12/G/2022/PTUN.SMD	13-Oct-22	Pertanahan	Kasasi
17	13/G/2022/PTUN.SMD	25-Oct-22	Kepegawaian	Banding
18	16/G/2022/PTUN.SMD	28-Oct-22	Lain-lain	Kasasi
19	14/G/2022/PTUN.SMD	01-Nov-22	Kepegawaian	Banding
20	11/G/2022/PTUN.SMD	06-Dec-22	Pertanahan	Banding
21	6/G/2022/PTUN.SMD	07-Dec-22	Pertanahan	Banding
22	20/G/2022/PTUN.SMD	12-Dec-22	Pertanahan	Kasasi

**DATA SALINAN PUTUSAN PERKARA YANG DIKIRIM KEPADA PIHAK TEPAT WAKTU
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
TAHUN 2022**

No	Nomor Perkara Kasasi	Tanggal Putus Kasasi	Klasifikasi Perkara	Tahapan	Tanggal Permohonan
1	42/G/2020/PTUN.SMD	08-Feb-22	Pertanahan	Kasasi	
2	48/G/2020/PTUN.SMD	15-Feb-22	Lain-lain	Kasasi	
3	45/G/2020/PTUN.SMD	15-Feb-22	Lain-lain	Kasasi	
4	39/G/2020/PTUN.SMD	15-Feb-22	Pertanahan	Kasasi	
5	38/G/2020/PTUN.SMD	15-Feb-22	Lain-lain	Kasasi	Langsung Eksekusi
6	1/G/TF/2021/PTUN.SMD	21-Feb-22	Lain-lain	Kasasi	
7	49/G/2020/PTUN.SMD	21-Feb-22	Lain-lain	Peninjauan Kembali	27/05/2022
8	36/G/2020/PTUN.SMD	21-Feb-22	Lain-lain	Peninjauan Kembali	01/07/2022
9	50/G/2020/PTUN.SMD	15-Mar-22	Pertanahan	Kasasi	
10	47/G/2020/PTUN.SMD	15-Mar-22	Lain-lain	Kasasi	
11	12/G/TF/2021/PTUN.SMD	17-Mar-22	Lain-lain	Kasasi	
12	7/G/2021/PTUN.SMD	17-Mar-22	Pertanahan	Kasasi	
13	13/G/2021/PTUN.SMD	22-Mar-22	Pertanahan	Kasasi	
14	40/G/2020/PTUN.SMD	31-Mar-22	Perijinan	Kasasi	
15	8/G/2021/PTUN.SMD	12-Apr-22	Pertanahan	Kasasi	
16	42/G/2021/PTUN.SMD	31-Oct-22	Pertanahan	Kasasi	
17	40/G/2021/PTUN.SMD	13-Dec-22	Pertanahan	Kasasi	

LAMPIRAN IX
LKjIP PTUN Samarinda Tahun 2022

**DATA SALINAN PUTUSAN PERKARA YANG DIKIRIM KEPADA PIHAK TEPAT WAKTU
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
TAHUN 2022**

NO	NOMOR PERKARA	TANGGAL PUTUS	TANGGAL BAYAR PNBP	TANGGAL PENGAMBILAN SALINAN	LAMA PENGAMBILAN	KETERANGAN
1	24/G/2021/PTUN.SMD	11-Jan-22	14-Jan-22	14-Jan-22	3	Tepat Waktu
2	27/G/TF/2021/PTUN.SMD	13-Jan-22	17-Jan-22	17-Jan-22	4	Tepat Waktu
3	28/G/2021/PTUN.SMD	26-Jan-22	4-Feb-22	4-Feb-22	8	Tepat Waktu
4	29/G/2021/PTUN.SMD	18-Jan-22	26-Jan-22	26-Jan-22	8	Tepat Waktu
5	34/G/2021/PTUN.SMD	26-Jan-22	3-Feb-22	3-Feb-22	7	Tepat Waktu
6	44/G/2021/PTUN.SMD	20-Jan-22			-	Tidak Tepat Waktu
7	37/G/2021/PTUN.SMD	24-Feb-22	1-Mar-22	1-Mar-22	7	Tepat Waktu
8	36/G/2021/PTUN.SMD	24-Feb-22	1-Mar-22	1-Mar-22	7	Tepat Waktu
9	35/G/2021/PTUN.SMD	24-Feb-22	1-Mar-22	1-Mar-22	7	Tepat Waktu
10	32/G/TF/2021/PTUN.SMD	17-Feb-22	11-Mar-22	11-Mar-22	24	Tidak Tepat Waktu
11	1/G/2022/PTUN.SMD	17-Mar-22	-	-	-	Tidak Tepat Waktu
12	42/G/2021/PTUN.SMD	30-Mar-22	31-Mar-22	31-Mar-22	0	Tepat Waktu
13	30/G/2021/PTUN.SMD	15-Mar-22	16-Mar-22	16-Mar-22	1	Tepat Waktu
14	39/G/2021/PTUN.SMD	21-Apr-22	22-Apr-22	22-Apr-22	1	Tepat Waktu
15	40/G/2021/PTUN.SMD	13-Apr-22	17-Apr-22	17-Apr-22	4	Tepat Waktu
16	41/G/2021/PTUN.SMD	25-Apr-22	9-May-22	9-May-22	14	Tepat Waktu
17	48/G/TF/2021/PTUN.SMD	21-Apr-22	22-Apr-22	22-Apr-22	1	Tepat Waktu
18	7/G/2022/PTUN.SMD	28-Apr-22	11-May-22	11-May-22	13	Tepat Waktu
19	15/G/2022/PTUN.SMD	28-Apr-22	17-May-22	17-May-22	19	Tidak Tepat Waktu
20	2/G/KI/2022/PTUN.SMD	5-Apr-22	11-Apr-22	11-Apr-22	6	Tepat Waktu
21	8/G/2022/PTUN.SMD	10-May-22	10-May-22	10-May-22	0	Tepat Waktu
22	45/G/2021/PTUN.SMD	19-May-22	20-May-22	20-May-22	1	Tepat Waktu
23	3/G/2022/PTUN.SMD	19-May-22	23-May-22	23-May-22	4	Tepat Waktu
24	46/G/2021/PTUN.SMD	16-Jun-22	20-Jun-22	20-Jun-22	4	Tepat Waktu
25	4/G/2022/PTUN.SMD	23-Jun-22	27-Jun-22	27-Jun-22	4	Tepat Waktu
26	10/G/2022/PTUN.SMD	27-Jun-22	29-Jun-22	29-Jun-22	2	Tepat Waktu
27	5/G/2022/PTUN.SMD	29-Jun-22	29-Jun-22	29-Jun-22	0	Tepat Waktu
28	12/G/2022/PTUN.SMD	26-Jul-22	26-Jul-22	26-Jul-22	0	Tepat Waktu
29	16/G/2022/PTUN.SMD	27-Jul-22	3-Aug-22	3-Aug-22	6	Tepat Waktu

30	25/G/TF/2022/PTUN.SMD	3-Aug-22	-	-	-	Tidak Tepat Waktu
31	26/G/TF/2022/PTUN.SMD	3-Aug-22	-	-	-	Tidak Tepat Waktu
32	13/G/2022/PTUN.SMD	4-Aug-22	11-Aug-22	11-Aug-22	7	Tepat Waktu
33	14/G/2022/PTUN.SMD	4-Aug-22	11-Aug-22	11-Aug-22	7	Tepat Waktu
34	9/G/TF/2022/PTUN.SMD	9-Aug-22	10-Aug-22	10-Aug-22	1	Tepat Waktu
35	23/G/2022/PTUN.SMD	18-Aug-22	-	-	-	Tidak Tepat Waktu
36	17/G/2022/PTUN.SMD	22-Aug-22	6-Sep-22	6-Sep-22	14	Tepat Waktu
37	18/G/2022/PTUN.SMD	7-Sep-22	-	-	-	Tidak Tepat Waktu
38	27/G/2022/PTUN.SMD	15-Sep-22	-	-	-	Tidak Tepat Waktu
39	11/G/2022/PTUN.SMD	20-Sep-22	22-Sep-22	22-Sep-22	2	Tepat Waktu
40	6/G/2022/PTUN.SMD	21-Sep-22	29-Sep-22	29-Sep-22	8	Tepat Waktu
41	20/G/2022/PTUN.SMD	18-Oct-22	19-Oct-22	19-Oct-22	1	Tepat Waktu
42	33/G/2022/PTUN.SMD	19-Oct-22	-	-	-	Tidak Tepat Waktu
43	19/G/LH/2022/PTUN.SMD	16-Nov-22	28-Nov-22	28-Nov-22	12	Tepat Waktu
44	24/G/2022/PTUN.SMD	30-Nov-22	-	-	-	Tidak Tepat Waktu
45	35/G/TF/2022/PTUN.SMD	15-Nov-22	-	-	-	Tidak Tepat Waktu
46	36/G/2022/PTUN.SMD	7-Nov-22	19-Dec-22	19-Dec-22	42	Tidak Tepat Waktu
47	22/G/2022/PTUN.SMD	01-Dec-22	22-Dec-22	22-Dec-22	21	Tidak Tepat Waktu
48	30/G/2022/PTUN.SMD	20-Dec-22	20-Dec-22	20-Dec-22	0	Tepat Waktu
49	29/G/2022/PTUN.SMD	27-Dec-22	27-Dec-22	27-Dec-22	0	Tepat Waktu

**DATA PERKARA BHT YANG TELAH DITINDAKLANJUTI
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
TAHUN 2022**

No	Nomor Perkara Kasasi	Tanggal BHT	Klasifikasi Perkara	Tahapan	Status Perkara	Tanggal Permohonan Eksekusi	Tanggal Ditindaklanjuti	Keterangan
1	33/G/2020/PTUN.SMD	3-Feb-22	Lain-lain	Kasasi	BHT			
2	44/G/2019/PTUN.SMD	3-Feb-22	Kepegawaian	Kasasi	BHT			
3	18/G/2020/PTUN.SMD	3-Feb-22	Lain-lain	Kasasi	BHT			
4	13/G/2020/PTUN.SMD	3-Feb-22	Pertanahan	Kasasi	BHT			
5	27/G/2020/PTUN.SMD	7-Feb-22	Pertanahan	Kasasi	BHT			
6	28/G/2021/PTUN.SMD	16-Feb-22	Pertanahan	Tingkat Pertama	BHT			
7	34/G/2021/PTUN.SMD	16-Feb-22	Kepegawaian	Tingkat Pertama	BHT			
8	35/G/2021/PTUN.SMD	21-Mar-22	Lain-lain	Tingkat Pertama	BHT			
9	36/G/2021/PTUN.SMD	21-Mar-22	Lain-lain	Tingkat Pertama	BHT			
10	37/G/2021/PTUN.SMD	21-Mar-22	Lain-lain	Tingkat Pertama	BHT			
11	37/G/2020/PTUN.SMD	17-Mar-22	Lain-lain	Kasasi	BHT			
12	32/G/2020/PTUN.SMD	17-May-21	Lain-lain	Eksekusi	BHT	5-Apr-22		Perkara BHT 2021
13	2/G/KI/2022/PTUN.SMD	27-Apr-22	Keterbukaan Informasi Publik	Tingkat Pertama	BHT			
14	49/G/2020/PTUN.SMD	28-Apr-22	Lain-lain	Kasasi	BHT			
15	48/G/2020/PTUN.SMD	25-Apr-22	Lain-lain	Kasasi	BHT			
16	39/G/2020/PTUN.SMD	26-Apr-22	Pertanahan	Kasasi	BHT			
17	30/G/2021/PTUN.SMD	7-Apr-22	Pertanahan	Tingkat Pertama	BHT			
18	36/G/2020/PTUN.SMD	9-May-22	Lain-lain	Kasasi	BHT			
19	42/G/2020/PTUN.SMD	9-May-22	Pertanahan	Kasasi	BHT			

20	24/G/2021/PTUN.SMD	17-May-22	Lain-lain	Banding	BHT			
21	29/G/2021/PTUN.SMD	17-May-22	Pertanahan	Banding	BHT			
22	40/G/2020/PTUN.SMD	25-May-22	Perijinan	Kasasi	BHT			
23	47/G/2020/PTUN.SMD	25-May-22	Lain-lain	Kasasi	BHT			
24	50/G/2020/PTUN.SMD	25-May-22	Pertanahan	Kasasi	BHT			
25	1/G/TF/2021/PTUN.SMD	25-May-22	Lain-lain	Kasasi	BHT			
26	7/G/2022/PTUN.SMD	31-May-22	Kepegawaian	Tingkat Pertama	BHT			
27	39/G/2021/PTUN.SMD	2-Jun-22	Pertanahan	Tingkat Pertama	BHT			
28	3/G/2022/PTUN.SMD	13-Jun-22	Kepegawaian	Tingkat Pertama	BHT			
29	45/G/2020/PTUN.SMD	17-Jun-22	Pertanahan	Kasasi	BHT			
30	8/G/2021/PTUN.SMD	17-Jun-22	Pertanahan	Kasasi	BHT			
31	38/G/2020/PTUN.SMD	22-Jun-22	Lain-lain	Kasasi	BHT			
32	12/G/TF/2021/PTUN.SMD	22-Jun-22	Lain-lain	Kasasi	BHT			
33	13/G/2021/PTUN.SMD	22-Jun-22	Pertanahan	Kasasi	BHT			
34	7/G/2021/PTUN.SMD	22-Jun-22	Pertanahan	Kasasi	BHT			
35	32/G/TF/2021/PTUN.SMD	27-Jun-22	Lain-lain	Banding	BHT			
36	34/G/2021/PTUN.SMD	16-Feb-22	Kepegawaian	Eksekusi	BHT	21-Jun-22		Perkara BHT 16 Februari 2022
37	5/G/2022/PTUN.SMD	19-Jul-22	Lain-lain	Tingkat Pertama	BHT			
38	17/G/2021/PTUN.SMD	12-Aug-22	Pertanahan	Kasasi	BHT			
39	9/G/TF/2022/PTUN.SMD	1-Sep-22	Lain-lain	Tingkat Pertama	BHT			
40	46/G/2020/PTUN.SMD	5-Sep-22	Pertanahan	Kasasi	BHT			
41	14/G/2021/PTUN.SMD	5-Oct-22	Lain-lain	Kasasi	BHT			
42	46/G/2021/PTUN.SMD	11-Oct-22	Pertanahan	Banding	BHT			
43	14/G/2022/PTUN.SMD	29-Nov-22	Kepegawaian	Banding	BHT			
44	13/G/2022/PTUN.SMD	15-Nov-22	Kepegawaian	Banding	BHT			
45	27/G/TF/2021/PTUN.SMD	15-Nov-22	Pertanahan	Kasasi	BHT			
46	25/G/2021/PTUN.SMD	3-Nov-22	Pertanahan	Kasasi	BHT			

47	21/G/2021/PTU.SMD	3-Nov-22	Pertanahan	Kasasi	BHT			
48	18/G/2021/PTUN.SMD	3-Nov-22	Lain-lain	Kasasi	BHT			
49	37/G/2020/PTUN.SMD	17-Mar-22	Lain-lain	Eksekusi	BHT	21-Nov-22		Perkara BHT 17 Maret 2022
50	38/G/2020/PTUN.SMD	22-Jun-22	Lain-lain	Eksekusi	BHT	21-Nov-22		Perkara BHT 22 Juni 2022
51	42/G/2021/PTUN.SMD	8-Dec-22	Pertanahan	Kasasi	BHT			
52	48/G/TF/2021/PTUN.SMD	30-Dec-21	Lain-lain	Kasasi	BHT			
53	24/G/2022/PTUN.SMD	20-Dec-22	Pertanahan	Tingkat Pertama	BHT			
54	11/G/2022/PTUN.SMD	28-Dec-22	Pertanahan	Banding	BHT			
55	6/G/2022/PTUN.SMD	21-Dec-22	Pertanahan	Banding	BHT			

**HASIL SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
PERIODE JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2022**

Nomor Urut responden	NILAI PER UNSUR LAYANAN																									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11	U12	U13	U14	U15	U16	U17	U18	U19	U20	U21	U22	U23	U24	U25	
1	3	1	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	4	1	3	3	3	3	3	3	3	3	
2	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	0	4	0	0	0	0	0	4	4	4
4	4	1	3	3	2	3	1	2	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4
5	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6	4	4	4	4	2	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	4	3	3	4	3	4	1	3	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	2	4	4	4	
9	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4
10	3	4	4	4	3	4	1	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4
11	3	3	4	4	3	4	1	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4
12	3	3	3	3	2	2	1	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	2	3	4	4	4	4
13	4	3	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4
14	4	4	4	4	2	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3
15	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4
16	2	4	4	4	2	4	2	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4
17	4	3	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4
18	3	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3
20	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	2	4	2	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4
21	4	2	3	4	2	3	1	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4
22	3	2	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
23	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3
24	3	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
26	2	2	2	3	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
27	4	4	3	4	3	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
28	4	2	3	4	2	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
29	3	3	2	3	2	4	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
30	3	3	2	3	2	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4

31	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
32	4	3	3	3	2	4	1	3	3	3	3	4	3	3	2	4	4	3	3	3	4	4	2	3	3	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
34	4	4	4	4	1	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
35	2	4	2	2	1	4	1	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	
36	4	4	4	4	3	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
38	4	4	4	4	2	2	0	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
39	3	1	3	3	3	3	1	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	2	4	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Jumlah Nilai per unsur	138	128	137	143	115	142	77	138	138	139	145	147	141	137	133	142	128	139	134	133	130	130	150	145	149	
Nilai Rata – Rata per Unsur/jumlah responden	3,450	3,200	3,425	3,575	2,875	3,550	1,925	3,450	3,450	3,475	3,625	3,675	3,525	3,425	3,325	3,550	3,200	3,475	3,350	3,325	3,250	3,250	3,750	3,625	3,725	
Nilai rata rata tertimbang per unsur = Nilai rata-Rata per unsur x 0.04	0,138	0,128	0,137	0,143	0,115	0,142	0,077	0,138	0,138	0,139	0,145	0,147	0,141	0,137	0,133	0,142	0,128	0,139	0,134	0,133	0,130	0,130	0,150	0,145	0,149	
Jumlah Nilai Tertimbang	3,378																									
Index Kepuasan Masyarakat = Jumlah Nilai Tertimbang x 25	84,450																									
Mutu Pelayanan	A																									
Kinerja Unit Pelayanan	SANGAT BAIK																									

LAMPIRAN XII
LKjIP PTUN Samarinda Tahun 2022

**HASIL SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA
TAHUN 2022**

Nomor Urut responden	NILAI PER UNSUR LAYANAN																									Jumlah Nilai Per Responden	Rata-rata per responden	Tingkat Kepuasan Responden	
	U 1	U 2	U 3	U 4	U 5	U 6	U 7	U 8	U 9	U 0	U 1	U 1	U 1	U 1	U 1	U 1	U 1	U 1	U 1	U 1	U 2	U 2	U 2	U 2	U 2				U 2
1	3	1	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	4	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	70	2,8	Puas
2	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	72	2,88	Puas
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	0	4	0	0	0	0	4	4	4	76	3,04	Sangat Puas	
4	4	1	3	3	2	3	1	2	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	75	3	Puas	
5	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	78	3,12	Sangat Puas	
6	4	4	4	4	2	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	95	3,8	Sangat Puas	
7	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80	3,2	Sangat Puas	
8	4	3	3	4	3	4	1	3	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	2	4	4	4	84	3,36	Sangat Puas	
9	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	87	3,48	Sangat Puas	
10	3	4	4	4	3	4	1	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	90	3,6	Sangat Puas	
11	3	3	4	4	3	4	1	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	83	3,32	Sangat Puas
12	3	3	3	3	2	2	1	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	2	3	4	4	4	74	2,96	Puas
13	4	3	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	85	3,4	Sangat Puas
14	4	4	4	4	2	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	3	88	3,52	Sangat Puas
15	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	88	3,52	Sangat Puas	
16	2	4	4	4	2	4	2	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	86	3,44	Sangat Puas
17	4	3	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	94	3,76	Sangat Puas
18	3	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	93	3,72	Sangat Puas

19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	99	3,96	Sangat Puas	
20	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	2	4	2	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	92	3,68	Sangat Puas	
21	4	2	3	4	2	3	1	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	77	3,08	Sangat Puas
22	3	2	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	72	2,88	Puas	
23	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	74	2,96	Puas	
24	3	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	89	3,56	Sangat Puas	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	4	Sangat Puas	
26	2	2	2	3	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	69	2,76	Puas	
27	4	4	3	4	3	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	95	3,8	Sangat Puas	
28	4	2	3	4	2	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	92	3,68	Sangat Puas	
29	3	3	2	3	2	4	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	71	2,84	Puas	
30	3	3	2	3	2	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	3	3	3	3	4	4	4	74	2,96	Puas	
31	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	97	3,88	Sangat Puas	
32	4	3	3	3	2	4	1	3	3	3	3	4	3	3	2	4	4	3	3	3	4	4	2	3	3	77	3,08	Sangat Puas	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	4	Sangat Puas	
34	4	4	4	4	1	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	94	3,76	Sangat Puas	
35	2	4	2	2	1	4	1	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	82	3,28	Sangat Puas	
36	4	4	4	4	3	4	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	96	3,84	Sangat Puas	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	4	Sangat Puas	
38	4	4	4	4	2	2	0	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	58	2,32	Puas	
39	3	1	3	3	3	3	1	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	4	2	4	72	2,88	Puas	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	4	Sangat Puas	